**PERUBAHAN**

**RENCANA STRATEGI**

**KECAMATAN BONTOMATENE TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KECAMATAN BONTOMATENE**

**TAHUN 2023**

**KATA PENGANTAR**

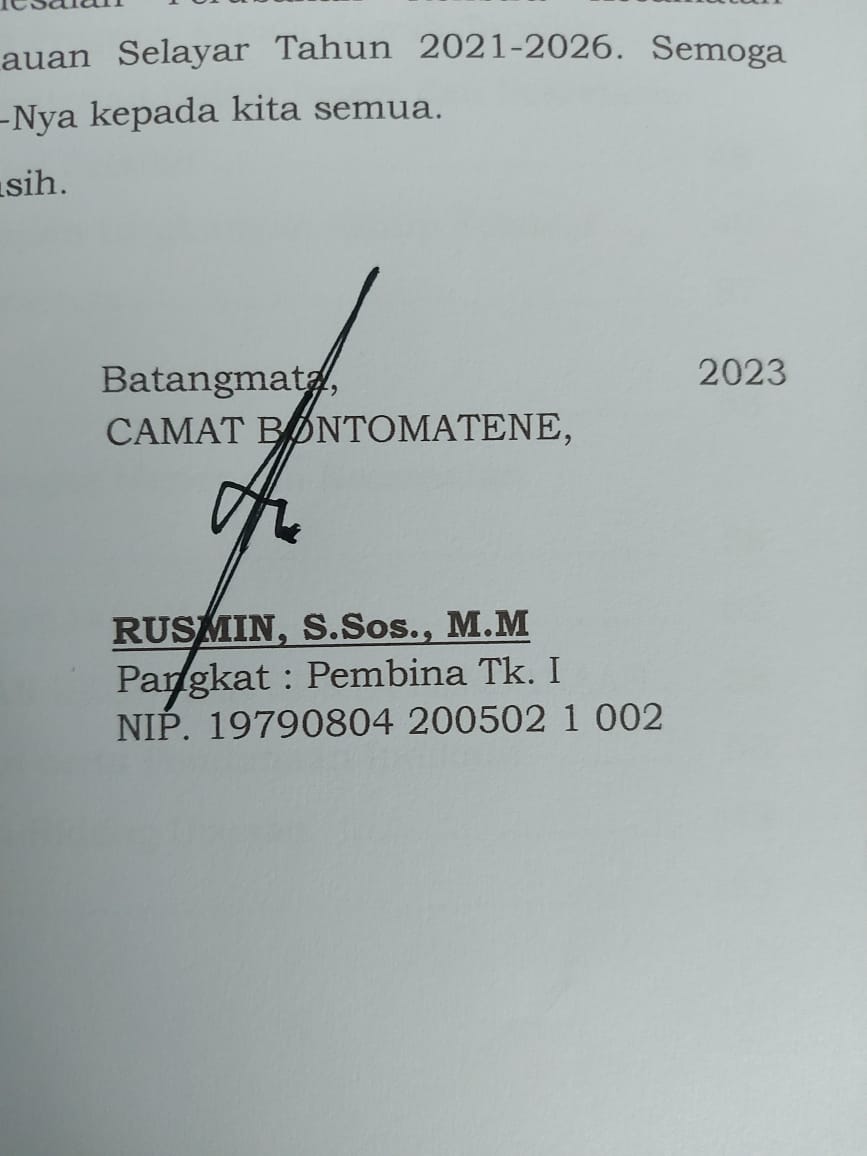
Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kinerja tahunan (Renja) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Perubahan Renstra Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.



Batangmata, 2023

CAMAT BONTOMATENE,

**RUSMIN, S.Sos., M.M**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19790804 200502 1 002

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sitematika Penulisan 7

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Bontomatene 9

2.1 Tugas, Fungsi, dan Truktur Organisasi 9

2.2 Sumber daya Kecamatan 29

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan 33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Bontomatene 39

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

BONTOMATENE 45

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kecamatan 45

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah Terpilih 49

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 50

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi 53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 60

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Bontomatene 60

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 64

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 70

5.1 Program dan Kegiatan 71

5.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif 72

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 95

# BAB VIII Penutup 100

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang – undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJM.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontomatene mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontomatene, dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 - 2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025, RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 – 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bontomatene Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Kecamatan Bontomatene pada dasarnya di latarbelakangi kebutuhan dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek dari perencanaan pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJMD dan RTRW Kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan arah pembangunan.

## 1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontomatene (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor );

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Maksud dari pembuatan Rencana strategis Perubahan Kecamatan Bontomatene ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemrintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah.

### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bontomatene ini adalah :

1. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
2. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar bidang dalam Perangkat Daerah

## 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN,  Bab ini Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMATENE  Bab ini Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Bontomatene, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan. |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMATENE,  Bab ini berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kajian terhadap Penentuan isuisu strategis. |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bontomatene

|  |  |
| --- | --- |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontomatene dalam lima tahun mendatang. |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  Bab ini berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, |

Bab ini Berisi Indikator Kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMATENE**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

## A. Kecamatan

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

## ➢ Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

### 1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati;

1. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan;
3. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
4. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
5. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
6. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
7. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
8. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
9. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
10. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
7. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
8. mengelola administrasi umum;
9. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
10. mengelola administrasi keuangan;
11. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
12. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

## Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan

Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

1. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

Tugas;

1. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan Tugas;

1. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
2. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
3. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
4. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
5. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
6. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
7. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
8. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
9. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
10. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
11. menyusun neraca keuangan kecamatan;
12. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan

Kecamatan;

1. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
2. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
3. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
4. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan

Kecamatan;

1. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
2. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
3. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
4. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan Tugas;

1. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
2. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
3. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

pemeliharaan dokumen kepegawaian;

1. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
2. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
3. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
4. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
5. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
6. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
8. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
9. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
10. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

1. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
2. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
3. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
5. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
8. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
9. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
7. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
8. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong

Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;

1. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
3. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
4. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
5. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 5. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegitan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
9. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
10. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
11. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
12. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
13. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekomomian;
14. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
15. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Desa/Kelurahan;

1. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
3. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
5. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
6. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
7. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
8. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
9. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
10. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

1. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
2. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
3. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
5. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
6. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
7. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*Gambar 1*

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BONTOMATENE**

CAMAT

**RUSMIN, S.SOS.,M.M**

NIP. 19790804 200502 1 002

KASI EKBANG

**ALIMUDDIN, SE**

NIP. 19760309 200502 1 003

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

**MURNI OPU, ST**

NIP. 19810923 200604 2 011

KASI TRANTIB

**SUBHAN NUR, S.M**

NIP. 19790418 200903 1 002

KASI PEMERINTAHAN

**Drs. Hj. ANDI SYUMIATI**

NIP.19650704 201407 2 001

KASI KESOS

**MUDA AGUS, S.Pd**

NIP. 19700805 199203 1 012 029

SEKRETARIS

**ANDI ROSTATI, SE**

**NIP. 19710921 200701 2 013**

**KA. SUB. BAG. UMUM, KEPEGAWAIAN & HUKUM**

**RUDI AMAL, S.Sos**

**NIP. 19700301 201001 1 007**

**KA. SUB. BAG. PROGRAM & KEUANGAN**

**NURSAM, A.Md**

**NIP. 19771101 201001 1 014**

*Sumber: Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2020*

## B. Kelurahan

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Regulasi tersebut diatas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang menegaskan bahwa Kelurahan tidak lagi perangkat daerah, akan tetapi fungsinya lebih kepada perangkat kecamatan. Oleh sebab itu tugas pokok dan fungsi dikelurahan secara umum mengadopsi tugas pokok dan fungsi di Kecamatan. Adapun 2 kelurahan di Kecamatan Bontomatene adalah Kelurahan Batangmata dana Kelurahan Batangmata Sapo.

# 1. LURAH

Lurah mempunyai tugas Pokok Melakukan kegiatan / pelayanan dibidang pemerintahan, ekonomi,dan pembangunan, kesejahteraan sosial,serta ketentraman dan ketertiban umum, guna terputarnya roda pemerintahan dan pelayanan yang optimal disegala bidang . Untuk pelaksanaan tugasnya Lurah mempunyai fungsi :

* menyusun rencana kegiatan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
* mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
* memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
* Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
* mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
* melaksanakan urusan pemerintahan umum
* mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
* mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
* mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
* mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan
* mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan
* Menyelenggarakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
* mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kelurahan
* membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
* menyusun laporan pelaksanaan tugas Lurah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
* melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

# 2. SEKRETARIAT

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan dengan tugas pokok melaksanakan semua kegiatan administrasi dengan cara mengkoordinir mengevaluasi, menyusun program kerja guna tercapainya pelayanan yang memuaskan dan optimal.

Adapun uraian tugas Sekretariat Kelurahan sebagai berikut :

* menyusun rencana kerja Sekretaris Lurah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
* mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
* memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretaris Lurah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
* menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
* mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
* melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan administrasi
* mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
* melaksanakan pelayanan administrasi di bidang Pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial
* melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis
* menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Lurah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
* melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

# 3. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum sebagai unsur pelayanan teknis di bidang pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, ketentraman, dan Ketertiban Umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

* Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
* Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
* memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
* Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
* Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
* Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi, dan mencatat data di bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum
* Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum
* Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
* Mengumpulkan, menghimpun, dan melaporkan data Kependudukan dan membantu tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
* Memberikan bantuan, melaksanakan koordinasi dan melaporkan sehubungan penyelenggaraan tugas di bidang pertanahan
* Melaksanakan tugas pungutan pajak, retribusi dan pendataan lain di tingkat Lurah
* Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan
* Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong

Praja pada Lurah yang bersangkutan

* Memfasilitasi penegakan peraturan daerah bersama PPNS
* Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban
* Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu
* Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban
* Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
* Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

# 4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

* Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
* Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
* Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
* Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
* Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
* Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasikan data di bidang pemberdayaan masyarakat
* Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat
* Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
* Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
* Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya
* Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
* Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

# 5. KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi, Pembangunan serta Kesejahteraan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

* Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
* Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
* Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
* Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
* Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
* Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasikan data di bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial
* Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial
* Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan pembangunan
* Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
* Memberikan fasilitasi tumbuh dan berkembangnya lembaga perekonomian
* Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial
* Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial
* Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
* Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

*Gambar 1*

# STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

*2*

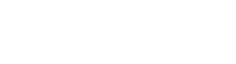
*1*

*-*

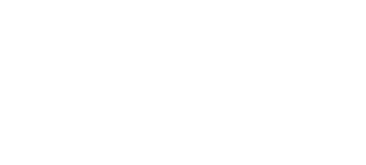
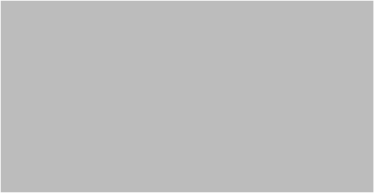
*20*

*2*

*6*



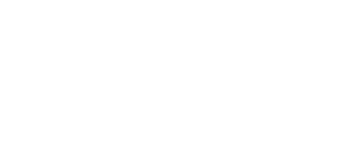
**LURAH**



**KEPALA SEKSI EKONOMI,**

**PEMBANGUNAN DAN**

**KESEJAHTERAAN SOSIAL**

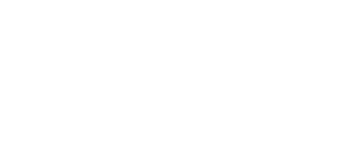


**KEPALA SEKSI**

**PEMERINTAHAN,**

**KETENTRAMAN DAN**

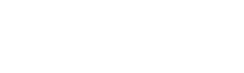
**KETERTIBAN UMUM**



**KEPALA SEKSI**

**PEMBERDAYAAN**

**MASYARAKAT**



**SEKRETARIS**

**KELURAHAN**

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Bontomatene

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Bontomatene didukung oleh 48 ( Empat Puluh Delapan ) orang pegawai Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

## *Tabel 2.2.1*

**SUSUNAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN BONTOMATENE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TINGKAT JABATAN** | **JUMLAH** | | **Tingkat Gol.**  **Ruang** | **JUMLAH** | | **Tingkat Pendidikan** | **JUMLAH** | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Eselon III A | 1 | Orang | IV | 1 | Orang | S1 | 15 | Orang |
| 2 | Eselon III B | 1 | Orang | III | 16 | Orang | DIV |  | Orang |
| 3 | Eselon IV A | 5 | Orang | II | 6 | Orang | DIII | 1 | Orang |
| 4 | Eselon IV B | 2 | Orang | I |  | Orang | SMA | 32 | Orang |
| 5 | Staf | 40 | Orang | PHL | 26 | Orang | SMP | 1 | Orang |
|  | **JUMLAH** | **49 Orang** | |  | **49 Orang** | |  | **49 Orang** | |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomatene Desember 2023*

## *Tabel 2.2.1*

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomatene Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | |
| 1 | Diklat Pim III |  |  | Orang |
| 2 | Diklat Pim IV |  | 4 | Orang |
|  | **JUMLAH** |  | 4 | **Orang** |
|  |  |  |  |  |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomatene Desember 2023*

Tabel 2.2.1

Susunan Kepegawaian Kelurahan Batangmata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** |  | **JUMLAH** |  | **JUMLAH** |  | **JUMLAH** | |
|  | **TINGKAT JABATAN** |  | **Tingkat Gol.**  **Ruang** |  | **Tingkat Pendidikan** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Eselon IV A | 1 Orang | IV | Orang | S2 | 1 | Orang |
| 2 | Eselon IV B | 4 Orang | III | 8 Orang | S1 | 12 | Orang |
| 3 | Non Eselon | 8 Orang | II | 5 Orang | DIII | 1 | Orang |
| 4 | PHL | 18 Orang | I | Orang | SMA | 17 | Orang |
| 5 |  |  | PHL | 18 Orang | SMP |  | Orang |
|  | **JUMLAH** | **31 Orang** |  | **31 Orang** |  | **31 Orang** | |

*Sumber : Data Kepegawaian Kelurahan Batangmata Desember 2023*

Tabel 2.2.1

Susunan Kepegawaian Kelurahan Batangmata Berdasarkan

Pendidikan Penjenjangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PENDIDIKAN PENJENJANGAN** | **JUMLAH** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Diklat Pim III | - |
|  | Diklat Pim IV | 1 orang |
|  | **Jumlah** | 1 orang |

*Sumber : Data Kepegawaian Kelurahan Batangmata Desember 2023*

# Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Kelurahan Batangmata Sapo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TINGKAT JABATAN** | **JUMLAH** | **Tingkat Gol.**  **Ruang** | **JUMLAH** | **Tingkat Pendidikan** | **JUMLAH** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Eselon IV A | 1 Orang | IV | Orang | S1 | 7 | Orang |
| 2 | Eselon IV B | 4 Orang | III | 5 Orang | DIII | 2 | Orang |
| 3 | Non Eselon | 4 Orang | II | 4 Orang | DII | 1 | Orang |
| 4 | PHL | 22 Orang | I | Orang | SMA | 21 | Orang |
| 5 |  |  | PHL | 22 Orang | SMP |  | Orang |
|  | **JUMLAH** | **31 Orang** |  | **31 Orang** |  | **31 Orang** | |

*Sumber : Data Kepegawaian Kelurahan Batangmata Sapo, 2023*

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Bontomatene

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontomatene.

## *Tabel 2.2.2*

**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bontomatene**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis** | **Jumlah** | **Ket.** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | **Sarana** |  |  |
|  | Sepeda Motor | 4 Buah |  |
|  | Meja kayu/Rotan/Meja | 3 Buah |  |
|  | Kursi Kayu | 11 Buah | Baik |
|  | Lemari Kayu | 1 Buah | Baik |
|  | Rak Kayu | 2 Buah | Baik |
|  | Lemari Kaca | 1 Buah | Baik |
|  | Papan Visual | 2 Buah | Baik |
|  | Mesin Pompa Air | 1 Buah | Baik |
|  | Lemari Arsip | 1 Buah | Baik |
|  | Meja Kerja | 8 Buah | Baik |
|  | Kursi Besi/Metal | 3 Buah | Baik |
|  | Kursi Kerja Lainnya | 10 Buah | Baik |
|  | Kursi Rapat | 50 Buah | Baik |
|  | Kursi Tamu | 1 Buah | KB |
|  | Sofa | 1 Buah | Baik |
|  | Mimbar/Podium | 1 Buah | Baik |
|  | P.C unit/ Komputer/PC | 2 Unit |  |
|  | Laptop | 2 Unit | Baik |
|  | Note Book | 8 Buah | Baik |
|  | CPU | 4 Unit | KB |
|  | Serial Printer | 2 Unit |  |
|  | Printer/Printer Laser Jet | 1 Unit | Baik |
|  | Printer | 2 Unit |  |
|  | Monitor | 2 Unit | Baik |
|  | Personal Komputer | 1 Unit |  |
|  | Meja Kerja Pej.Es IV | 13 Buah |  |
|  | Komputer PC | 1 Unit | Baik |
|  | Genset | 1 Buah |  |
|  | Rak Peralatan | 1 Buah |  |
|  |  |  |  |
| **2** | **Prasarana** |  |  |
|  | Tanah bangunan Rumah Negara tanpa Golongan | 1 Buah |  |
|  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 Buah |  |
|  | Bangunan Gedung Kantor permanen | 1 Buah |  |
|  | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 1 Buah |  |
|  | Rumah Negara Gol.I | 1 Buah |  |
|  | Gudang Tertutup Permanen | 1 Buah |  |
|  | Gedung Garasi Lain-lain | 1 Buah |  |
|  |  |  |  |

*Sumber : Data Asset Desember 2023*

*Tabel 2.2.2*

Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Batangmata

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Tanah Kantor | 332.600.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 158.175.676,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 265.000.000,00 |

Tabel 2.2.2

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kelurahan Batangmata

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | JUMLAH LEMBAGA | JUMLAH GURU | JUMLAH SISWA |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | TK | 1 | 9 | 62 |
| 2. | PAUD | - | - | - |
| 3. | SD | 2 | 41 | 205 |
| 4. | MI | - | - | - |
| 5. | SLTP | 1 | 36 | 287 |
| 6. | MTs | - | - | - |
| 7. | SLTA | 1 | 50 | 523 |
| 8. | MA | - | - | - |

*Sumber : Kelurahan Batangmata 2023*

Tabel 2.2.2

Data Fasilitas/Sarana Kesehatan di Kelurahan Batangmata

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | SARANA KESEHATAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | PUSKESMAS | 1 |  |
| 2. | PUSKESMAS PEMBANTU | - |  |
| 3. | POSKESDES | - |  |
| 4. | POSYANDU | 2 |  |

*Sumber : Kelurahan Batangmata 2023*

# Tabel 2.2.2

Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Batangmata Sapo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Sarana dan Prasarana** | **Jumlah** |
| 1. | Tanah | ......... M² |
| 2. | Gedung | 1 Unit |
| 3. | Kendaraan Roda Dua | 4 unit |
| 4. | Meja Kerja ½ biro | 10 Buah |
| 5. | Meja Kerja 1 biro | 1 Buah |
| 6. | Kursi Futura | ..... Buah |
| 7. | Kursi Tamu / Spon + Kayu | 3set |
| 8. | Kursi Putar | 5 Buah |
| 9. | Kursi Plastik | ........ Buah |
| 10. | Almari Arsip Kayu | .... Buah |
| 11. | Almari Arsip Besi / Feeling Kabbinet | ...... Buah |
| 12. | Almari Arsip Kaca | ..... Buah |
| 20. | Meja Rapat Kayu | ..... Buah |
| 21. | Laptop | ..... Unit |
| 22. | Televisi | 1 Buah |
| 23. | WIRELESS | 1 Buah |
| 24. | Printer | ..... Buah |
| 25. | Jam Dinding | 1 Buah |
| 26. | AC | 1 Buah |
| 27. | Kipas Angin | 2 Buah |
| 28. | Camera | 1 Buah |
| 29. | Papan Pengumuman | 1 Buah |

*Sumber : Data Arsip Barang Kelurahan Batangmata Sapo, 2023*

## 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomatene

Adapun Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan

Bontomatene yang dicapai selama 5 Tahun sesuai Tugas dan

Fungsi Kecamatan dapat di gambarkan dalam tabel 2.3.1 dan

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontomatene sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1 T-C. 23**

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomatene

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

**(tabel 2 baris ke-2 diisi tahun 2016-2020)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  O | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target NSPK | Target IKK | Target  Indikator  Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Terciptanya peningkatan kualitas program pemberdayaan masyarakat |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Terciptanya  Ketentraman dan  Ketertiban umum dalam rangka  terciptanya suasana aman dan kondusif |  |  |  | 53% | 55% | 60% | 65% | 75% | 53% | 55% | 60% | 65% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Terciptanya  pelayanan yang  berorientasi kepada pelayanan prima |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Terciptanya  disiplin aparatur dalam rangka  terciptanya peningkatan kualitas capaian kinerja |  |  |  | 9 | 15 | 17 | 18 | 19 | 9 | 15 | 17 | 18 | 19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| N  O | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target NSPK | Target IKK | Target  Indikator  Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 5. | Terciptanya kualitas sumber daya aparatur dalam rangka  terciptanya peningkatan kualitas capaian kinerja |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Terciptanya Efektifitas pelaksanaan koordinasi antar unit kerja lingkup kecamatan dan unsure penunjamg lainnya |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabel 2.3.2 T-C. 2.4**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontomatene**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**

## (tabel 2 baris ke-2 diisi tahun 2016-2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)** | | | | | **Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-**  **(dalam ribuan)** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-** | | | | | | **Rata-Rata Pertumbuhan** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | | **Realisasi** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** | ***(10)*** | ***(11)*** | ***(12)*** | ***(13)*** | ***(14)*** | ***(15)*** | ***(16)*** | ***(17)*** | | ***(18)*** |
| **Program Pelayanan**  **Administrasi**  **Perkantoran** | 91. 000 | 300.  000 | 329.86  0 | 330.  261,2 | 307.3 61,41  8 |  | 300.0  00 | 301.76  0 | 330.2  61,2 | 300.6  79,13  1 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Peningkatan**  **Sarana dan**  **Prasarana Aparatur** | 16. 000 | 106.  000 | 161.0  00 | 140.  330 | 94. 330 |  | 106.0  00 | 160.4  65 | 140.3  30 | 93.84  5 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Peningkatan**  **Kapasitas Sumber**  **Daya Aparatur** | 47.4  000 | 9. 000 | 56.50  0 | 15. 000 | 67. 000 |  | 9.000 | 43.95  5 | 15.00  0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program Penataan**  **Administrasi**  **Kependudukan** | 30. 000 | 35. 000 | 7 000 | 17. 000 | 7. 000 |  | 35.00  0 | 7.000 | 17.00  0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Pengembangan**  **Nilai Budaya** | 20. 000 | 50. 000 | 50. 000 | 55. 000 | 40. 000 | 17.50  0 | 50.00  0 | 50.00  0 | 55.00  0 | 10.22  0 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Peningkatan** | 30. 000 | 50. 000 | 14. 000 | 20. 000 | 70. 000 | 8.700 | 50.00  0 | 14.00  0 | 20.00  0 | 8.700 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Uraian** | **Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)** | | | | | **Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-**  **(dalam ribuan)** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-** | | | | | | **Rata-Rata Pertumbuhan** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | | **Realisasi** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** | ***(10)*** | ***(11)*** | ***(12)*** | ***(13)*** | ***(14)*** | ***(15)*** | ***(16)*** | ***(17)*** | | ***(18)*** |
| **Keamanan dan**  **Kenyamanan**  **Lingkungan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil**  **Menengah** | 152.  000 | 10. 000 | 7. 000 | 30. 000 | 6.100 |  | 10.00  0 | 4.600 | 30.00  0 | 6.100 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program Peningkatan**  **Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** | 18. 000 | 80. 000 | 52.00  0 | 50.00  0 | 25.97  5 |  | 80.00  0 | 52.00  0 | 37.00  0 | 25.97  5 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan**  **Keuangan Desa** | 14. 000 | 20. 000 | 5.000 | 10.00  0 | 4.700 |  | 20.00  0 | 5.000 | 10.00  0 | 4.700 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Pemberdayaan dan**  **Kesejahteraan**  **Keluarga** | 17. 000 | 10. 000 | 10.00  0 | 20.00  0 | 10.00  0 |  | 10.00  0 | 10.00  0 | 20.00  0 | 10.00  0 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program Pembinaan Tata Ruang Wilayah** | 5. 000 | 10. 000 | 7.000 |  |  |  | 10.00  0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Peningkatan** | 30. 000 | 5. 000 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Uraian** | **Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam ribuan)** | | | | | **Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-**  **(dalam ribuan)** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran**  **Tahun Ke-** | | | | | | **Rata-Rata Pertumbuhan** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | | **Realisasi** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** | ***(10)*** | ***(11)*** | ***(12)*** | ***(13)*** | ***(14)*** | ***(15)*** | ***(16)*** | ***(17)*** | | ***(18)*** |
| **Keselamatan Ibu**  **Melahirkan dan**  **Anak** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Pembinaan**  **Keagamaan** | 20. 000 | 20. 000 |  | 10.00  0 | 9.700 |  | 20.00  0 |  | 10.00  0 | 9.700 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** | 15. 000 | 10. 000 |  | 5.000 |  |  | 10.00  0 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Peningkatan**  **Pengembangan**  **Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  | 50.00  0 |  | 12.00  0 | 12.50  0 |  | 50.00  0 |  | 12.00  0 | 12.50  0 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Program**  **Peningkatan**  **Koordinasi,**  **Fasilitasi dan**  **Penyelenggaraan**  **Bidang**  **Ketentraman dan**  **Ketertiban Umum** |  |  |  | 10.00  0 | 3.700 |  |  |  | 10.00  0 | 3.700 |  |  |  |  |  |  | |  |

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontomatene.**

### 2.4.1.Tantangan

Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan yang dihadapi yakni :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Sarana dan Prasaran yang belum memadai
3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah.

Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bontomatene kedepan, utamanya dimulai dari dalam OPD itu sendiri yakni peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kecamatan Bontomatene dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

* Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Bontomatene dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
* Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Bontomatene yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011;
* Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan–kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontomatene .
* Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
* Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

**2.4.2. Peluang.**

Dalam melaksanakan pelayanan kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki, Kantor Kecamatan Bontomatene diharapkan mampu untuk lebih meningkatan kinerja pelayanan public baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Harapan ini tentunya diharapkan dengan melalui pelaksanaan yang lebih responsive serta dengan meningkatnya koordinasi di seluruh lini dan elemen yang ada ditengah-tengah masyarakat termasuk pada tataran pemerintah tingkat atas.

Adapun peluang yang bisa di maanfaatkan antara lain :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**KECAMATAN BONTOMATENE**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

### Pelayanan Kecamatan Bontomatene

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontomatene sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020, maka Kecamatan Bontomatene mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
3. Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan Pembangunan Daerah.
4. Lambatnya Peranan Fungsi kelembagaan akibat kurang koordinasi masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kecamatan Bontomatene adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial , bidang keamanan maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil**

### Kepala Daerah Terpilih

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontomatene sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

### “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur

**Indonesia ”**

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. ***Bandar Maritim*** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengankepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang,

jasa, dan industri; dan

1. ***Kawasan Timur Indonesia*** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan TimurIndonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat istribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi husus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor

(perikanan dan non perikanan); dan

1. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas.

2.Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3.Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4.Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5.Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepiulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
   1. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
   2. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
   3. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
   4. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate. e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa. Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

a.Tersedianya lahan untuk kawasan.

b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.

c.Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.

d.Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.

e.Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

1. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

a.Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.

b.Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.

c.Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.

d.Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.

e.Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.

f.Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.

g.Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

a.Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.

b.Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.

c.Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.

d.Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

a.Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.

b.Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.

c.Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.

d.Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e.Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang

Kecamatan Bontosikuyu, berupa

a.Tersedianya lahan untuk kawasan.

b.Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.

c.Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.

d.Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.

e.Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

#### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi selatan

##### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra Kementerian Dalam Negeri terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah Program Pembinaan Kapsitas Pemerintahan Daerah Dan Desa dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun faktor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan. Sejalan dengan dinamika globalisasi baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi yang fleksibilitas dan terbuka, sehingga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil ( Civil Liberty ) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, yang diberi tugas dalam perencanaan Pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional, untuk mengurangi kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan akuntabel.

**3.3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan** Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai referensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah untuk membuka kerja sama dengan daerah lain yang bernilai ekonomi tinggi.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain : Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, terbatasnya kesempatan dan lapangan kerja, dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk Pemenuhan standar pelayanan dasar, akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya maritim, peningkatan investasi sarana dan prasarana industri, melakukan kerjasama dengan lembaga/pihak lain pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

##### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk merwujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

1. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
2. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
3. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
4. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
5. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
6. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
7. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
8. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
9. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
10. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan; Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:
   1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
   2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
   3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
   4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
   5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
   6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
   7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan; Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
   1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masingmasing wilayah pelayanan;
   2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
   3. mengembangkan rute-rute pelayanan modal transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
   4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

* 1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman ; dan
  3. menyusun program

dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

1. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

* 1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
  2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
  3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
  5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

1. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

* 1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
  2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
  3. meningkatkan kapasitasmasyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

1. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
   1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
   2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
   3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
   4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
2. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

* 1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
  2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
  3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

1. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata.

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

* 1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
  3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional

Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

* 1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
  2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
  3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

1. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
   1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
   2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
   3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
   4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
2. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten. Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
   1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
   2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi kawasan Pariwisata;
   3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
   4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
   5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
   6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
   7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
   8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
3. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

* + 1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
    2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
    3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW

Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Kecamatan Bontomatene yaitu Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan Pamatata dan Kawasan Pariwisata Pa’badilang Desa Bungaiya.

##### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum, lapangan usaha dominan di Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap Sumber Daya Alam, khususnya bila dimanfaatkan tidak secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari isuisu lingkungan seperti banjir, kekeringan, alih fungsi lahan, pencemaran sampah, *illegal fishing*, kerusakan pesisir dan pantai. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menemui momentumnya sejalan dengan periode pemilihan kepala daerah, harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program RPJMD. Integrasi prinsip pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan KLHS RPJMD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tahapan penyusunan KLHS RPJMD dilaksanakan sebelum rancangan awal RPJMD yang difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

**3.5. Penentuan Isu –Isu Strategis**.

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontomatene yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 09 Tahun 2009, maka Kecamatan Bontomatene mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bontomatene dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Status Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Meningkatkan Partisipasi dan Peran serta Masyarakat
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontomatene.**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang direncanakan. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurung waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Perubahan Perencanaan Strategis Kecamatan Bontomatene. Sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, namun dapat dicapai secara orientasi pada hasil yang dicapai dalam periode tertentu.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauaan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasiken dalam Renstra Kecamatan Bontomatene 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, dengan sasaran berikut ini :
   1. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan :

* Meningkatnya Nilai SAKIP
* Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP
* Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan

tujuan:

a. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran berikut ini :

1. Meningkatnya fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan

b. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa, dengan Sasaran sebagai berikut :

a) Meningkatnya urusan pemerintahan desa yang difasilitasi

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan,

memiliki tujuan pembangunan:

a. Meningkatkan Aktualisasi Nilai Budaya, dengan sasaran berikut ini :

* 1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial
  2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Keagamaan

**Tabel 4.1. T-C. 25.**

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontomatene

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah (M-1) | Meningkatnya Kualitas  Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70 % | 72.6 % | 75.1 % | 80.1 % | 85.0 % |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Kecamatan | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Meningkatnya Penilaian BPK | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Meningkatnya  Keberdayaan  Masyarakat  Pedesaan (M-2) | Meningkatnya Kualitas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa | Persentase Meningkatnya  Fungsi Lembaga Desa yang  Dikoordinasikan | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 |
| Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3. | Meningkatnya  Pembinaan  Kehidupan Sosial  dan Keagamaan  (M-5) | Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | Indeks ketahanan  Sosial | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan | Angka Kriminalitas |  |  |  |  |  |

**Tabel 4.1. T-C. 25.**

**Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontomatene**

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontomatene adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bontomatene harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bontomatene menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontomatene.

1. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

* 1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
  2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
  3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontomatene yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
  4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontomatene agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

**Tabel 5.1 T-C. 26**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur** | | | | |
| **Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelolah Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan** | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan | Meningkatkan Efesiensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Serta Meningkatkan Inovasi Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan | Peningkatan disiplin sumber daya aparatur |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang berorientasi pada hasil | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| Meningkatnya Tertib  Administrasi Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan  Perundang-Undangan yang Berlaku | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur |
| **Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan** | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1. Meningkatnya  Keberdayaan  Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Kualitas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa | Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka  Peningkatan Produktifitas  Masyarakat Perdesaan Dan  Kualifikasi Desa | Mengkoordinasikan Kegiatan  Pembangunan Desa yang  Berorientasi Pada Peningkatan  Kualitas Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Program  Gerbang Sari |
| Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | Mengoptimalkan  Pengelolaan Sumberdaya | Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lokal Dalam Rangka  Mengembangkan Lapangan  Kerja Dan Lapangan Usaha  Di Perdesaan | dalam Mengembagkan Sumber Daya Untuk Peningkatan  Ekonomi Kerakyatan Dalam  Gerbang Sari |
| **Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1. Meningkatnya  Pembinaan Kehidupan  Sosial dan Keagamaan | Meningkatnya upaya  pelestarian kearifan lokal dengan  mengaktualisasikan pada kehidupan social | Meningkatkan Peran  Lembaga Sosial Dan  Keagamaan Dalam  Pembangunan Manusia  Dan Daerah | Koordinasi dan Fasilitasi  Pengintegrasian Tradisi Dan  Nilai-Nilai Kearifan Lokal  Kedalam Setiap Aktivitas  Masyarakat |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan |  | Koordinasi dan Fasilitasi  Peningkatan Pelayanan Keagamaan |

**Tabel 5.1 T-C. 26**

**Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur** | | | | |
| **Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelolah Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan** | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Meningkatkan Efesiensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Serta Meningkatkan Inovasi Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan | Meningkatkan Pelaksanaan dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara Konsisten |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang berorientasi pada hasil | Meningkatkan Profesionalisme aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan  Perundang-Undangan yang Berlaku | Peningkatan Efektivftas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah |
| **Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan** | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Pedesaan | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Mengoptimalkan dan Meningkatkan Koordinasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Dalam Rangka  Peningkatan Produktifitas  Masyarakat Perdesaan Dan  Kualifikasi Desa | Peningkatan Harmonisasi Regulasi Pembangunan Desa Dalam Program  Gerbang Sari |
| Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Desa dalam pembangunan | Peningkatan Saran dan Prasarana Bidang Pemerintahan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontomatene | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat | Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia Dan Daerah | Peningkatan Aktualisasi Penerapan Nilai – nilai Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pelayanan Keagamaan |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomatene | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontomatene | Meningkatkan peran lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan Daerah | Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kebudayaan dan Keagamaan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN BONTOMATENE** | | | | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN SELAYAR PERIODE 2021-2026** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan** | **Target Kinerja Program** | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah** | |
| **Tahun-1 (2022)** | **Tahun-2 (2023)** | **Tahun-3 (2024)** | **Tahun-4 (2025)** | **Tahun-5 (2026)** |  | |
|
| **K** | **K** | **K** | **K** | **K** | **K** | **K** | |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontomatene |  | Indeks Refomasi Birokrasi Kecamatan Bontomatene | 33 | 55 | 64 | 68 | 73 | 76 | 76 | |
|  | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan bontomatene | Nilai SAKIP Kecamatan | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | 0 | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bontomatene | 66,68 | 70 | 72,5 | 75 | 80 | 85 | 85 | |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontomatene | 0,6456 | 0,7730 | 0,7800 | 0,7950 | 0,8145 | 0,8225 | 0,8225 | |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | Persentase urusan pemerintahan desa yang difasilitasi | 0 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 98 | |
| Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontomatene |  | Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Bontomatene | - | 0,6900 | 0,7000 | 0,7001 | 0,7150 | 0,7150 | 0,7150 | |
|  | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan | 0 | 67,44 | 71,23 | 75,35 | 77,14 | 80,25 | 80,25 | |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomatene |  | Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan | - | 78,13 | 80,15 | 82,30 | 85,75 | 90,35 | 90,35 | |
|  | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontomatene | Tingkat toleransi di Kecamatan | 0 | 90,09 | 91,12 | 92,23 | 92,75 | 93,15 | 93,15 | |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontomatene | 0,6456 | 0,7730 | 0,7800 | 0,7950 | 0,8145 | 0,8225 | 0,8225 | |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase peningkatan fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan | 0 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | |

**BAB VI**

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan atau sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD akan di uraikan di bawah ini.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program, kegiatan dan sub Kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

* 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat D aerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

* 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

PerundangUndangan

1. Administasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangundangan

* 1. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

* 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lainnya

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
   1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di

Kecamatan

* 1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
  2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

* 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
     1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
     1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
     2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dimaksudkan untuk menjaga ketentraman dan Ketertiban, kerukunanan antar umat beragama di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

* 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
     1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan

* 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
     1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program ini dimaksudkan untuk pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat, Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama dalam mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

* 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
     1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestraian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* + 1. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan stabilitas Lokal, Regional dan Nasional.

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program ini dimaksudkan untuk Pembinaan dan Pengawasan jalannya Pemerintahan di Desa agar tercipta Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan akuntabel baik dalam Pengelolaan keuangan maupun pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

* 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
     1. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
     2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
     3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
     4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
     5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Adapun Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif di tuangkan dalam Tabel 6.1 Tabel T-C 27 sebagai Berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 6.1 T-C. 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN KECAMATAN BONTOMATENE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **TAHUN 2022 - 2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  |  |
| TUJUAN | SASARAN | KODE | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2020)** | **TAHUN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | | | | **Penanggung Jawab** | | **Ket.** |  | |
|  |  |  |  |  |  | **2022** | | | **2023** | | | | | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | | |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | **Target** | **Rp.** | | **Target** | | **Rp.** | | | **Target** | **Rp.** | | **Target** | | **Rp.** | **Target** | | | **Rp.** | **Target** | | | **Rp.** |  | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | | **11** | **12** | | **13** | | **14** | **15** | | | **16** | **17** | | | **18** | **19** | | **20** |  | |
|  |  | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  | **KECAMATAN** |  |  |  | **7.606.816.405** | |  | | **7.710.953.722** | | |  | **7.903.958.894** | |  | | **8.093.574.867** |  | | | **8.286.687.563** |  | | | **8.286.687.563** | **Kecamatan** | |  |  | |
|  |  | **7,01** | **KECAMATAN BONTOMATENE** |  |  |  | **4.012.650.220** | |  | | **4.067.583.401** | | |  | **4.169.395.015** | |  | | **4.269.418.800** |  | | | **4.371.287.134** |  | | | **4.371.287.134** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  | **KELURAHAN BATANGMATA** |  |  |  | **1.799.739.420** | |  | | **1.824.377.853** | | |  | **1.870.042.031** | |  | | **1.914.904.339** |  | | | **1.960.593.956** |  | | | **1.960.593.956** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  | **KELURAHAN BATANGMATA SAPO** |  |  |  | **1.794.426.765** | |  | | **1.818.992.468** | | |  | **1.864.521.848** | |  | | **1.909.251.728** |  | | | **1.954.806.473** |  | | | **1.954.806.473** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | **..01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Porsentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | 65.13 | 73.01% | **4.584.020.430** | | 77.64% | | **4.646.775.669** | | | 79.26% | **4.763.084.464** | | 81.25% | | **4.877.350.861** | 83.65% | | | **4.993.724.452** | 83.65% | | | **4.993.724.452** |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **3.881.119.220** | |  | | **3.934.251.742** | | |  | **4.032.726.063** | |  | | **4.129.471.161** |  | | | **4.228.000.343** |  | | | **4.228.000.343** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **316.980.000** | |  | | **321.319.456** | | |  | **329.362.082** | |  | | **337.263.479** |  | | | **345.310.585** |  | | | **345.310.585** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **385.921.210** | |  | | **391.204.471** | | |  | **400.996.319** | |  | | **410.616.221** |  | | | **420.413.524** |  | | | **420.413.524** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan | | | Meningkatnya Nilai Sakip Daerah | **58.85 (CC)** |  | **60.00 (B)** | |  | | **65.00 (B)** | | |  | **70.00 (BB)** | |  | | **75.00 (BB)** |  | | | **80.00 (A)** |  | | | **80.00 (A)** |  | |  |  | |
|  |  |  |  | Penilaian BPK atas laporan Keuangan Kecamatan | **WTP** |  | **WTP** | |  | | **WTP** | | |  | **WTP** | |  | | **WTP** |  | | | **WTP** |  | | | **WTP** |  | |  |  | |
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah | | **..01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 50.91% | 63.03% | **21.000.000** | | 70.25% | | **21.000.000** | | | 70.53% | **21.000.000** | | 71.51% | | **21.000.000** | 72.31% | | | **21.000.000** | 72.31% | | | **21.000.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **500.000** | |  | | **900.000** | | |  | **1.900.000** | |  | | **5.000.000** |  | | | **2.000.000** |  | | | **2.000.000** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **5.250.000** | |  | | **5.250.000** | | |  | **5.250.000** | |  | | **5.250.000** |  | | | **5.250.000** |  | | | **5.250.000** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | | | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.250.000 | | 1 Dokumen | | 1.250.000 | | | 1 Dokumen | 1.250.000 | | 1 Dokumen | | 1.250.000 | 1 Dokumen | | | 1.250.000 | 1 Dokumen | | | 1.250.000 | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah Dokumen RKA yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | | | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000 | | 1 Dokumen | | 500.000 | | | 1 Dokumen | 1.500.000 | | 1 Dokumen | | 2.500.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | | | 1 Dokumen | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | | | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000 | | 1 Dokumen | | 400.000 | | | 1 Dokumen | 400.000 | | 1 Dokumen | | 2.500.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | | | 1 Dokumen | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD | Jumlah DPA yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | | | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | | | 1 Dokumen | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD | Jumlah DPA Perubahan yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | | | 1 Dokumen | 3.000.000 | | 1 Dokumen | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | 1 Dokumen | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Dokumen |  | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | | | 1 Dokumen | 1.000.000 | | 1 Dokumen | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | 1 Dokumen | | | 1.000.000 | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000 | | 1 Laporan | | 3.000.000 | | | 1 Laporan | 3.000.000 | | 1 Laporan | | 3.000.000 | 1 Laporan | | | 3.000.000 | 1 Laporan | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang dievaluasi Hasil Kinerjanya | 24 Orang | 24 Orang | 3.000.000 | | 24 Orang | | 3.000.000 | | | 24 Orang | 3.000.000 | | 24 Orang | | 3.000.000 | 24 Orang | | | 3.000.000 | 24 Orang | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | **..01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Porsentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | | 83.00% | **3.354.455.309** | | 85.00% | | **3.354.455.309** | | | 88.00% | **3.354.455.309** | | 91.00% | | **3.354.455.309** | 95.00% | | | **3.354.455.309** | 95.00% | | | **3.354.455.309** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 79.35 |  | **77.180.000** | |  | | **77.580.000** | | |  | **83.280.000** | |  | | **85.180.000** |  | | | **83.680.000** |  | | | **83.680.000** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **273.000.000** | |  | | **273.000.000** | | |  | **273.000.000** | |  | | **273.000.000** |  | | | **273.000.000** |  | | | **273.000.000** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | 38 ASN | 40 ASN | 3.300.335.309 | | 40 ASN | | 3.300.335.309 | | | 40 ASN | 3.300.335.309 | | 40 ASN | | 3.300.335.309 | 40 ASN | | | 3.300.335.309 | 40 ASN | | | 3.300.335.309 | Bontomatene | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 5 ASN | 5 ASN | 73.680.000 | | 5 ASN | | 73.680.000 | | | 5 ASN | 73.680.000 | | 5 ASN | | 73.680.000 | 5 ASN | | | 73.680.000 | 5 ASN | | | 73.680.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 5 ASN | 5 ASN | 54.000.000 | | 5 ASN | | 54.000.000 | | | 5 ASN | 54.000.000 | | 5 ASN | | 54.000.000 | 5 ASN | | | 54.000.000 | 5 ASN | | | 54.000.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | Porsentase Tersedianya Administrasi ASN (%) | 100% | 100% | 1.500.000 | | 100% | | 2.000.000 | | | 100% | 3.200.000 | | 100% | | 4.500.000 | 100% | | | 5.000.000 | 100% | | | 5.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 100% | 100% | 216.000.000 | | 100% | | 216.000.000 | | | 100% | 216.000.000 | | 100% | | 216.000.000 | 100% | | | 216.000.000 | 100% | | | 216.000.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan Penatausahaan/Verifikasi Keuangan Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 48.120.000 | | 1 Laporan | | 48.120.000 | | | 1 Laporan | 48.120.000 | | 1 Laporan | | 48.120.000 | 1 Laporan | | | 48.120.000 | 1 Laporan | | | 48.120.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000 | | 1 Laporan | | 3.000.000 | | | 1 Laporan | 3.000.000 | | 1 Laporan | | 3.000.000 | 1 Laporan | | | 3.000.000 | 1 Laporan | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000 | | 1 Laporan | | 400.000 | | | 1 Laporan | 400.000 | | 1 Laporan | | 2.500.000 | 1 Laporan | | | 1.000.000 | 1 Laporan | | | 1.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran | 4 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000 | | 12 Laporan | | 3.000.000 | | | 12 Laporan | 3.000.000 | | 12 Laporan | | 3.000.000 | 12 Laporan | | | 3.000.000 | 12 Laporan | | | 3.000.000 | Bontomatene | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 2 Laporsn | 2 Laporsn | 1.500.000 | | 2 Laporsn | | 1.500.000 | | | 2 Laporsn | 6.000.000 | | 2 Laporsn | | 4.500.000 | 2 Laporsn | | | 4.000.000 | 2 Laporsn | | | 4.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 2 laporan | 4 laporan | 3.000.000 | | 4 laporan | | 3.000.000 | | | 4 laporan | 3.000.000 | | 4 laporan | | 3.000.000 | 4 laporan | | | 3.000.000 | 4 laporan | | | 3.000.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **..01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah (%) | 100 | 100% | **3.000.000** | | 100% | | **3.000.000** | | | 100% | **3.000.000** | | 100% | | **14.000.000** | 100% | | | **18.000.000** | 100% | | | **18.000.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dibuatkan perencanaannya | 1 Unit | 1 Unit | 500.000 | | 1 Unit | | 500.000 | | | 1 Unit | 500.000 | | 1 Unit | | 11.000.000 | 1 Unit | | | 15.000.000 | 1 Unit | | | 15.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Aset Daerah yang disusun | 1 Laporan | 4 Laporan | 2.500.000 | | 4 Laporan | | 2.500.000 | | | 4 Laporan | 2.500.000 | | 4 Laporan | | 3.000.000 | 4 Laporan | | | 3.000.000 | 4 Laporan | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **..01.2.04** | **XXX Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | |  |  | **-** | |  | | **-** | | |  | **-** | |  | | **-** |  | | | **-** |  | | | **-** |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.04.01 | XXX Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.04.02 | XXX Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.04.03 | XXX Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.04.04 | XXX Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.04.05 | XXX Pengolahan Data Retribusi Daerah |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.04.06 | XXX Penetapan Wajib Retribusi Daerah |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.04.07 | XXX Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakan akan Pelayanan | **..01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai (%) | 100 | 100% | **32.000.000** | | 100% | | **58.950.000** | | | 100% | **37.000.000** | | 100% | | **37.000.000** | 100% | | | **78.750.000** | 100% | | | **78.750.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | N/A | 24 Set | 15.000.000 | | 49 Set | | 36.950.000 | | | 24 Set | 15.000.000 | | 24 Set | | 15.000.000 | 49 Set | | | 36.750.000 | 49 Set | | | 36.750.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Koordinasi yang dilkasanakan | 18 Kali | 24 Kali | 2.000.000 | | 24 Kali | | 2.000.000 | | | 24 Kali | 2.000.000 | | 24 Kali | | 2.000.000 | 24 Kali | | | 2.000.000 | 24 Kali | | | 2.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat | N/A | 1 Orang | 10.000.000 | | 1 Orang | | 10.000.000 | | | 1 Orang | 10.000.000 | | 1 Orang | | 10.000.000 | 2 Orang | | | 20.000.000 | 2 Orang | | | 20.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan | Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan | | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis | N/A | 1 Orang | 5.000.000 | | 2 Orang | | 10.000.000 | | | 2 Orang | 10.000.000 | | 2 Orang | | 10.000.000 | 2 Orang | | | 20.000.000 | 2 Orang | | | 20.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | **..01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100% | **122.155.711** | | 100% | | **122.338.233** | | | 100% | **133.802.554** | | 100% | | **135.047.652** | 100% | | | **135.326.834** | 100% | | | **135.326.834** | Bontomatene | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **8.300.000** | |  | | **9.139.456** | | |  | **13.882.082** | |  | | **30.583.479** |  | | | **13.380.585** |  | | | **13.380.585** | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **23.500.000** | |  | | **25.200.000** | | |  | **27.750.000** | |  | | **30.000.000** |  | | | **35.000.000** |  | | | **35.000.000** | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis alat Listrik yang disediakan | 3 Jenis | 3 Jenis | 2.500.000 | | 3 Jenis | | 2.500.000 | | | 3 Jenis | 2.500.000 | | 3 Jenis | | 2.500.000 | 3 Jenis | | | 2.500.000 | 3 Jenis | | | 2.500.000 | Bontomatene | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 2 Jenis | 2 Jenis | 800.000 | | 2 Jenis | | 1.000.000 | | | 2 Jenis | 1.500.000 | | 2 Jenis | | 1.500.000 | 2 Jenis | | | 1.000.000 | 2 Jenis | | | 1.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | 1 Unit | 2 Unit | 15.000.000 | | 2 Unit | | 15.000.000 | | | 2 Unit | 15.000.000 | | 2 Unit | | 15.000.000 | 2 Unit | | | 15.000.000 | 2 Unit | | | 15.000.000 | Bontomatene | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Logistik Kantor yang disediakan | 10 Jenis | 10 Jenis | 24.783.711 | | 10 Jenis | | 24.966.233 | | | 10 Jenis | 25.430.554 | | 10 Jenis | | 26.675.652 | 10 Jenis | | | 26.954.834 | 10 Jenis | | | 26.954.834 | Bontomatene | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 8 Jenis | 8 Jenis | 500.000 | | 8 Jenis | | 639.456 | | | 8 Jenis | 2.260.082 | | 8 Jenis | | 3.500.000 | 8 Jenis | | | 3.500.000 | 8 Jenis | | | 3.500.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dan jenis Barang yang dicetak dan digandakan | 3 Jenis | 3 Jenis | 7.000.000 | | 3 Jenis | | 7.000.000 | | | 3 Jenis | 8.000.000 | | 3 Jenis | | 8.000.000 | 3 Jenis | | | 8.000.000 | 3 Jenis | | | 8.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Jenis | 1 Jenis | 500.000 | | 1 Jenis | | 500.000 | | | 1 Jenis | 1.000.000 | | 1 Jenis | | 1.000.000 | 1 Jenis | | | 1.000.000 | 1 Jenis | | | 1.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Jenis bahan Bacaan yang disediakan | 1 Jenis | 2 Jenis | 2.000.000 | | 2 Jenis | | 2.000.000 | | | 2 Jenis | 2.000.000 | | 2 Jenis | | 2.000.000 | 2 Jenis | | | 2.000.000 | 2 Jenis | | | 2.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan Material |  | 1 Jenis | 1.000.000 | | 1 Jenis | | 1.000.000 | | | 1 Jenis | 2.000.000 | | 1 Jenis | | 2.583.479 | 1 Jenis | | | 1.880.585 | 1 Jenis | | | 1.880.585 | Batangmata | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Tamu yang di Fasilitasi | 75 Orang | 75 Orang | 3.000.000 | | 75 Orang | | 3.000.000 | | | 75 Orang | 3.000.000 | | 75 Orang | | 3.000.000 | 75 Orang | | | 3.000.000 | 75 Orang | | | 3.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 50 Orang | 50 Orang | 2.500.000 | | 75 Orang | | 3.000.000 | | | 75 Orang | 3.622.000 | | 20 Orang | | 1.000.000 | 20 Orang | | | 1.000.000 | 20 Orang | | | 1.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat - rapat Koordinasi / Konsultasi yang dilaksanakan | 385 Kali | 400 Kali | 67.872.000 | | 400 Kali | | 67.872.000 | | | 430 Kali | 77.872.000 | | 430 Kali | | 77.872.000 | 430 Kali | | | 77.872.000 | 430 Kali | | | 77.872.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 24 Kali | 24 Kali | 2.000.000 | | 24 Kali | | 2.000.000 | | | 30 Kali | 2.500.000 | | 130 Kali | | 20.000.000 | 50 Kali | | | 4.000.000 | 50 Kali | | | 4.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 150 Kali | 150 Kali | 23.500.000 | | 175 Kali | | 25.200.000 | | | 200 Kali | 27.750.000 | | 250 Kali | | 30.000.000 | 300 Kali | | | 35.000.000 | 300 Kali | | | 35.000.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.06.11 | XXX Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Porsentase Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (%) | | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | N/A | 100 | 1.000.000 | | 100% | | 1.000.000 | | | 100% | 1.000.000 | | 100% | | 1.000.000 | 100% | | | 1.000.000 | 100% | | | 1.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  | **..01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase Sarana dan Prasarana Daerah Yang diadakan (%) | | 100% | **-** | | 100% | | **-** | | | 100% | **68.000.000** | | 100% | | **152.500.000** | 100% | | | **205.000.000** | 100% | | | **205.000.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 100 |  | **16.000.000** | |  | | **16.500.000** | | |  | **10.000.000** | |  | | **15.000.000** |  | | | **16.000.000** |  | | | **16.000.000** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **8.250.000** | |  | | **10.000.000** | | |  | **15.500.000** | |  | | **20.750.000** |  | | | **23.500.000** |  | | | **23.500.000** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | ..01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan | N/A | N/A | 0 | |  | | 0 | | | 2 Unit | 53.000.000 | |  | | 0 | 2 Unit | | | 55.000.000 | 2 Unit | | | 55.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.07.05 | Pengadaan Mebel |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | Jumlah Mebel yang di sediakan | N/A | 3 Unit | 5.000.000 | | 3 Unit | | 5.000.000 | | | 3 Unit | 5.000.000 | | 3 Unit | | 5.000.000 | 3 Unit | | | 6.000.000 | 3 Unit | | | 6.000.000 | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin yang di adakan | N/A | 1 Set | 5.000.000 | | 1 Set | | 5.000.000 | | | 1 Set | 5.000.000 | | 1 Set | | 10.000.000 | 1 Set | | | 10.000.000 | 1 Set | | | 10.000.000 | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | N/A | N/A | 0 | |  | | - | | | 2 Unit | 15.000.000 | | 3 Unit | | 22.500.000 |  | | |  |  | | |  | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 6.000.000 | | 100% | | 6.500.000 | | |  |  | | 100% | |  |  | | |  |  | | |  | Batangmata | |  |  | |
|  |  | ..01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan | N/A | 1 Unit | 0 | |  | | 0 | | |  | 0 | | 1 Unit | | 130.000.000 | 1 Unit | | | 150.000.000 | 1 Unit | | | 150.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 8.250.000 | | 100% | | 10.000.000 | | | 100% | 15.500.000 | | 100% | | 20.750.000 | 100% | | | 23.500.000 | 100% | | | 23.500.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | **..01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Kelancaran Operasional Perkantoran (%) | | 100% | **283.928.200** | | 100% | | **287.928.200** | | | 100% | **290.888.200** | | 100% | | **290.888.200** | 100% | | | **290.888.200** | 100% | | | **290.888.200** | Bontomatene | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 100 |  | **177.000.000** | |  | | **178.000.000** | | |  | **179.000.000** | |  | | **173.000.000** |  | | | **181.500.000** |  | | | **181.500.000** | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **55.617.210** | |  | | **55.654.471** | | |  | **55.996.319** | |  | | **56.616.221** |  | | | **56.163.524** |  | | | **56.163.524** | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Jasa Layanan yang dibayarkan | 3 Jenis | 3 Jenis | 16.429.000 | | 3 Jenis | | 20.429.000 | | | 3 Jenis | 23.389.000 | | 3 Jenis | | 23.389.000 | 3 Jenis | | | 23.389.000 | 3 Jenis | | | 23.389.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 3 Jenis | 3 Jenis | 9.000.000 | | 3 Jenis | | 10.000.000 | | | 3 Jenis | 11.000.000 | | 3 Jenis | | 5.000.000 | 3 Jenis | | | 13.500.000 | 3 Jenis | | | 13.500.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 2 Jenis | 2 Jenis | 3.267.210 | | 2 Jenis | | 3.304.471 | | | 2 Jenis | 3.646.319 | | 2 Jenis | | 4.266.221 | 2 Jenis | | | 3.813.524 | 2 Jenis | | | 3.813.524 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah PHL yang dibayarkan Jasanya | 26 PHL | 26 PHL | 267.499.200 | | 26 PHL | | 267.499.200 | | | 26 PHL | 267.499.200 | | 26 PHL | | 267.499.200 | 26 PHL | | | 267.499.200 | 26 PHL | | | 267.499.200 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 21 PHL | 21 PHL | 168.000.000 | | 21 PHL | | 168.000.000 | | | 21 PHL | 168.000.000 | | 21 PHL | | 168.000.000 | 21 PHL | | | 168.000.000 | 21 PHL | | | 168.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 10 PHL | 10 PHL | 52.350.000 | | 10 PHL | | 52.350.000 | | | 10 PHL | 52.350.000 | | 10 PHL | | 52.350.000 | 10 PHL | | | 52.350.000 | 10 PHL | | | 52.350.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | **..01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Porsentase Sarana dan Prasaranan Aparatur yang Memadai (%) | | 100% | **64.580.000** | | 100% | | **86.580.000** | | | 100% | **124.580.000** | | 100% | | **124.580.000** | 100% | | | **124.580.000** | 100% | | | **124.580.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 100 | 100% | **38.000.000** | | 100% | | **39.200.000** | | | 100% | **41.300.000** | | 100% | | **28.500.000** | 100% | | | **48.750.000** | 100% | | | **48.750.000** | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 100% | **20.304.000** | | 100% | | **22.100.000** | | | 100% | **23.500.000** | | 100% | | **25.000.000** | 100% | | | **27.500.000** | 100% | | | **27.500.000** | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan yang di Pelihara dan di bayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 34.630.000 | | 1 Unit | | 34.630.000 | | | 1 Unit | 34.630.000 | | 1 Unit | | 34.630.000 | 1 Unit | | | 34.630.000 | 1 Unit | | | 34.630.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Operasional yang di Pelihara dan di bayarkan Pajaknya | 7 Unit | 7 Unit | 19.950.000 | | 7 Unit | | 19.950.000 | | | 7 Unit | 19.950.000 | | 7 Unit | | 19.950.000 | 7 Unit | | | 19.950.000 | 7 Unit | | | 19.950.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000 | | 1 Unit | | 1.200.000 | | | 1 Unit | 1.300.000 | | 1 Unit | | 3.500.000 | 1 Unit | | | 1.750.000 | 1 Unit | | | 1.750.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 5 Unit | 5 Unit | 14.344.000 | | 5 Unit | | 14.344.000 | | | 5 Unit | 14.344.000 | | 5 Unit | | 14.344.000 | 5 Unit | | | 14.344.000 | 5 Unit | | | 14.344.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan/Mesin yang dipelihara | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Unit | 1 Unit | 3.500.000 | | 1 Unit | | 3.500.000 | | | 1 Unit | 3.500.000 | | 1 Unit | | 3.500.000 | 1 Unit | | | 3.500.000 | 1 Unit | | | 3.500.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara/direhabilatsi | 2 Unit | 2 Unit | 5.000.000 | | 2 Unit | | 27.000.000 | | | 2 Unit | 55.000.000 | | 2 Unit | | 55.000.000 | 2 Unit | | | 55.000.000 | 2 Unit | | | 55.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Unit | 1 Unit | 37.000.000 | | 1 Unit | | 38.000.000 | | | 1 Unit | 40.000.000 | | 1 Unit | | 25.000.000 | 1 Unit | | | 47.000.000 | 1 Unit | | | 47.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 1 Unit | 1 Unit | 2.460.000 | | 1 Unit | | 4.256.000 | | | 1 Unit | 5.656.000 | | 1 Unit | | 7.156.000 | 1 Unit | | | 9.656.000 | 1 Unit | | | 9.656.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | ..01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabiliatsi | 7 Unit | 7 Unit | 5.000.000 | | 7 Unit | | 5.000.000 | | | 7 Unit | 15.000.000 | | 7 Unit | | 15.000.000 | 7 Unit | | | 15.000.000 | 7 Unit | | | 15.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | ..01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | ..01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Peningkatan Pelayanan di tingkat Kecamatan dan Desa/kelurahan | 30 Menit | 25 Menit | **12.000.000** | | 20 | | **72.164.280** | | | 15 | **73.970.552** | | 10 | | **75.745.105** | 8 | | | **77.552.383** | 8 | | | **77.552.383** | **Kecamatan** | |  |  | |
|  | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakan akan Pelayanan | | |  |  |  | **12.000.000** | |  | | **12.164.280** | | |  | **12.468.752** | |  | | **12.767.877** |  | | | **13.072.519** |  | | | **13.072.519** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **-** | |  | | **30.000.000** | | |  | **30.750.900** | |  | | **31.488.614** |  | | | **32.239.932** |  | | | **32.239.932** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **-** | |  | | **30.000.000** | | |  | **30.750.900** | |  | | **31.488.614** |  | | | **32.239.932** |  | | | **32.239.932** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Persentase Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan | 100 | 100% | **3.000.000** | | 100% | | **3.164.280** | | | 100% | **3.468.752** | | 100% | | **3.767.877** | 100% | | | **4.072.519** | 100% | | | **4.072.519** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi | Jumlah Koordinasi Perencanaan dengan Perangkat Daerah yang dilaksanakan | N/A | 42 | 3.000.000 | | 47 | | 3.164.280 | | | 52 | 3.468.752 | | 58 | | 3.767.877 | 65 | | | 4.072.519 | 65 | | | 4.072.519 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Kegiatan Pelayanan d Kecamatan | | | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**  **ada di Kecamatan** | Persentase Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan | 100 | 100% | **9.000.000** | | 100% | | **9.000.000** | | | 100% | **9.000.000** | | 100% | | **9.000.000** | 100% | | | **9.000.000** | 100% | | | **9.000.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Tersusunnya Profil Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000 | | 1 Dokumen | | 4.500.000 | | | 1 Dokumen | 4.500.000 | | 1 Dokumen | | 4.500.000 | 1 Dokumen | | | 4.500.000 | 1 Dokumen | | | 4.500.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Kepada Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000 | | 1 Dokumen | | 4.500.000 | | | 1 Dokumen | 4.500.000 | | 1 Dokumen | | 4.500.000 | 1 Dokumen | | | 4.500.000 | 1 Dokumen | | | 4.500.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 30.000.000 | | |  | 30.750.900 | |  | | 31.488.614 |  | | | 32.239.932 |  | | | 32.239.932 | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  | **7.01.02.2.03** | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | |  | 100% | **-** | | 100% | | **-** | | | 100% | **-** | | 100% | | **-** | 100% | | | **-** | 100% | | | **-** |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana  dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | - | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dipelihara | N/A | N/A |  | | 2 Unit | | 30.000.000 | | | 2 Unit | 30.750.900 | | 2 Unit | | 31.488.614 | 2 Unit | | | 32.239.932 | 2 Unit | | | 32.239.932 | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | 7.01.02.2.03.02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | | | | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | |  |  | - | |  | | - | | |  | - | |  | | - |  | | | - |  | | | - |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan | | | Indeks Desa Membangun | 0.6061 | 0.6300 |  | | 0.6650 | |  | | | 0.6700 |  | | 0.7150 | | 4,209027778 | 0.7300 | | |  | 07300 | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%) | 100% | 100% | **2.439.424.475** | | 100% | | **2.367.820.197** | | | 100% | **2.427.086.736** | | 100% | | **2.485.312.547** | 100% | | | **2.544.612.104** | 100% | | | **2.544.612.104** | **Kecamatan** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **45.000.000** | |  | | **45.616.050** | | |  | **46.757.820** | |  | | **47.879.540** |  | | | **49.021.946** |  | | | **49.021.946** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.169.559.420** | |  | | **1.140.570.689** | | |  | **1.169.119.173** | |  | | **1.197.166.342** |  | | | **1.225.730.731** |  | | | **1.225.730.731** | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.224.865.055** | |  | | **1.181.633.458** | | |  | **1.211.209.743** | |  | | **1.240.266.665** |  | | | **1.269.859.427** |  | | | **1.269.859.427** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%) | 100 | 100% | **20.000.000** | | 100% | | **20.000.000** | | | 100% | **20.000.000** | | 100% | | **20.000.000** | 100% | | | **20.000.000** | 100% | | | **20.000.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta  di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 60% | 65% | 20.000.000 | | 70% | | 20.000.000 | | | 72% | 20.000.000 | | 80% | | 20.000.000 | 85% | | | 20.000.000 | 85% | | | 20.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%) | 100 | 100% | **1.111.480.450** | | 100% | | **1.120.491.719** | | | 100% | **1.149.119.173** | | 100% | | **1.139.087.372** | 100% | | | **1.167.651.761** | 100% | | | **1.167.651.761** | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **1.180.825.055** | |  | | **1.137.593.458** | | |  | **1.167.169.743** | |  | | **1.196.226.665** |  | | | **1.225.819.427** |  | | | **1.225.819.427** | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan kelurahan | 55% | 60% | 5.000.000 | | 65% | | 5.000.000 | | | 70% | 5.000.000 | | 80% | | 7.500.000 | 85% | | | 8.000.000 | 85% | | | 8.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 55% | 60% | 42.120.000 | | 65% | | 42.120.000 | | | 70% | 42.120.000 | | 80% | | 42.120.000 | 85% | | | 42.120.000 | 85% | | | 42.120.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan (%) | N/A | 100% | 626.000.000 | | 100% | | 610.000.000 | | | 100% | 600.000.000 | | 100% | | 600.000.000 | 100% | | | 600.000.000 | 100% | | | 600.000.000 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | N/A |  | 745.035.055 | |  | | 693.473.458 | | |  | 718.049.743 | |  | | 744.106.665 |  | | | 757.699.427 |  | | | 757.699.427 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan | N/A | 5 Kegiatan | 480.480.450 | | 5 Kegiatan | | 505.491.719 | | | 5 Kegiatan | 544.119.173 | | 5 Kegiatan | | 531.587.372 | 5 Kegiatan | | | 559.651.761 | 5 Kegiatan | | | 559.651.761 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | N/A | 4 Kegiatan | 393.670.000 | | 4 Kegiatan | | 402.000.000 | | | 4 Kegiatan | 407.000.000 | | 4 Kegiatan | | 410.000.000 | 4 Kegiatan | | | 426.000.000 | 4 Kegiatan | | | 426.000.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | | 65% | **25.000.000** | | 67% | | **25.616.050** | | | 70% | **26.757.820** | | 75% | | **27.879.540** | 85% | | | **29.021.946** | 85% | | | **29.021.946** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 60% |  | **58.078.970** | |  | | **20.078.970** | | |  | **20.000.000** | |  | | **58.078.970** |  | | | **58.078.970** |  | | | **58.078.970** | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **44.040.000** | |  | | **44.040.000** | | |  | **44.040.000** | |  | | **44.040.000** |  | | | **44.040.000** |  | | | **44.040.000** | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah kegiatan PKK yang difasilitasi | 3 Kali | 3 Kali | 15.000.000 | | 3 Kali | | 15.616.050 | | | 3 Kali | 16.757.820 | | 3 Kali | | 17.879.540 | 3 Kali | | | 18.021.946 | 3 Kali | | | 18.021.946 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 3 Kali | 3 Kali | 58.078.970 | | 3 Kali | | 20.078.970 | | | 3 Kali | 20.000.000 | | 3 Kali | | 58.078.970 | 3 Kali | | | 58.078.970 | 3 Kali | | | 58.078.970 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  |  | 3 Kali | 3 Kali | 44.040.000 | | 3 Kali | | 44.040.000 | | | 3 Kali | 44.040.000 | | 3 Kali | | 44.040.000 | 3 Kali | | | 44.040.000 | 3 Kali | | | 44.040.000 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Desa yang difasilitasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 10 Desa | 10 Desa | 10.000.000 | | 10 Desa | | 10.000.000 | | | 10 Desa | 10.000.000 | | 10 Desa | | 10.000.000 | 10 Desa | | | 11.000.000 | 10 Desa | | | 11.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.03.05 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.03.2.04** | **Pemberdayaan Mukim** |  |  | 100% | **-** | | 100% | | **-** | | | 100% | **-** | | 100% | | **-** | 100% | | | **-** | 100% | | | **-** |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.04.01 | Penyelenggaraan Mukim |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.04.02 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.04.03 | Peresmian Mukim |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.04.04 | Pelantikan Imeum Mukim |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.03.2.04.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan | | | Angka Kriminalitas | N/A | 1.00 |  | | 1.00 | |  | | | 1.00 |  | | 1.00 | |  | 1.00 | | |  | 1.00 | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Kasus Kriminalitas di tingkat Kecamatan Desa / Kelurahan % | N/A | 1.00 | **19.600.000** | | 1.00 | | **49.868.324** | | | 1.00 | **51.116.529** | | 1.00 | | **52.342.814** | 1.00 | | | **53.591.713** | 1.00 | | | **53.591.713** | **Kecamatan** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **10.000.000** | |  | | **10.136.900** | | |  | **10.390.627** | |  | | **10.639.898** |  | | | **10.893.766** |  | | | **10.893.766** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **9.600.000** | |  | | **9.731.424** | | |  | **9.975.002** | |  | | **10.214.302** |  | | | **10.458.015** |  | | | **10.458.015** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | **30.000.000** | | |  | **30.750.900** | |  | | **31.488.614** |  | | | **32.239.932** |  | | | **32.239.932** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | **5.000.000** | | 100% | | **5.000.000** | | | 100% | **5.000.000** | | 100% | | **5.000.000** | 100% | | | **5.000.000** | 100% | | | **5.000.000** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 100% | **9.600.000** | | 100% | | **9.731.424** | | | 100% | **9.975.002** | | 100% | | **10.214.302** | 100% | | | **10.458.015** | 100% | | | **10.458.015** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **-** | |  | | **30.000.000** | | |  | **30.750.900** | |  | | **31.488.614** |  | | | **32.239.932** |  | | | **32.239.932** | **BatangMata Sapo** | | |  | |
|  |  | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Porsentase Koordinasi dengan Kepolisian dan TNI di tingkat kecamatan | | 100% | 5.000.000 | | 100% | | 5.000.000 | | | 100% | 5.000.000 | | 100% | | 5.000.000 | 100% | | | 5.000.000 | 100% | | | 5.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  | N/A |  | 9.600.000 | |  | | 9.731.424 | | |  | 9.975.002 | |  | | 10.214.302 |  | | | 10.458.015 |  | | | 10.458.015 | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | N/A | 0 | |  | | 30.000.000 | | |  | 30.750.900 | |  | | 31.488.614 |  | | | 32.239.932 |  | | | 32.239.932 | **BatangMata Sapo** | | |  | |
|  |  | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.04.2.02** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 100% | **5.000.000** | | 100% | | **5.136.900** | | | 100% | **5.390.627** | | 100% | | **5.639.898** | 100% | | | **5.893.766** | 100% | | | **5.893.766** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan  PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi | | 40 Orang | 5.000.000 | | 40 Orang | | 5.136.900 | | | 40 Orang | 5.390.627 | | 40 Orang | | 5.639.898 | 40 Orang | | | 5.893.766 | 40 Orang | | | 5.893.766 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | **7.01.04.2.03** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | |  |  | **-** | |  | | **-** | | |  | **-** | |  | | **-** |  | | | **-** |  | | | **-** |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.04.2.03.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.04.2.03.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.04.2.04** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah** | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan peraturan kepala Daerah | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | | **-** |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.04.2.04.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan  PerndangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terciptanya Koordinasi dan sinergi yang Baik | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| Meningkatkan Aktualisasi Nilai Budaya | Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social | | | Indeks ketahanan Sosial | 0.6817 | 0.6900 |  | | 0.7000 | |  | | | 0.7100 |  | | 0.7150 | |  | 0.7150 | | |  | 0.7150 | | |  |  | |  |  | |
|  |  | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di Tingkat Kecamatan (%) | 0.00 | 0.00 | **121.900.500** | | 0.00 | | **138.569.318** | | | 0.00 | **142.037.708** | | 0.00 | | **145.445.192** | 0.00 | | | **148.915.515** | 0.00 | | | **148.915.515** | **Kecamatan** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **39.700.000** | |  | | **40.243.493** | | |  | **41.250.788** | |  | | **42.240.394** |  | | | **43.248.250** |  | | | **43.248.250** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **-** | |  | | **15.000.000** | | |  | **15.375.450** | |  | | **15.744.307** |  | | | **16.119.966** |  | | | **16.119.966** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **82.200.500** | |  | | **83.325.825** | | |  | **85.411.470** | |  | | **87.460.491** |  | | | **89.547.299** |  | | | **89.547.299** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Persentase Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan (%) | 100% | 100% | **39.700.000** | | 100% | | **40.243.493** | | | 100% | **41.250.788** | | 100% | | **42.240.394** | 100% | | | **43.248.250** | 100% | | | **43.248.250** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **-** | |  | | **15.000.000** | | |  | **15.375.450** | |  | | **15.744.307** |  | | | **16.119.966** |  | | | **16.119.966** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **82.200.500** | |  | | **83.325.825** | | |  | **85.411.470** | |  | | **87.460.491** |  | | | **89.547.299** |  | | | **89.547.299** | **BatangMata Sapo** | | |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,  Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Porsentase Keikutsertaan dalam rangka HUT R.I dan Hari Jadi Selayar | 100% | 100% | 30.000.000 | | 100% | | 30.543.493 | | | 100% | 31.250.788 | | 100% | | 32.240.394 | 100% | | | 33.248.250 | 100% | | | 33.248.250 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 15.000.000 | | |  | 15.375.450 | |  | | 15.744.307 |  | | | 16.119.966 |  | | | 16.119.966 | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan | | | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan  Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti STQH | 12 Desa/kel | 12 Desa/kel | 9.700.000 | | 12 Desa/kel | | 9.700.000 | | | 12 Desa/kel | 10.000.000 | | 12 Desa/kel | | 10.000.000 | 12 Desa/kel | | | 10.000.000 | 12 Desa/kel | | | 10.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  | Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 82.200.500 | | 4 Kegiatan | | 83.325.825 | | | 4 Kegiatan | 85.411.470 | | 4 Kegiatan | | 87.460.491 | 4 Kegiatan | | | 89.547.299 | 4 Kegiatan | | | 89.547.299 | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.06 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan  oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Kapasitas dan Fasiltas Perdesaan | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Program Pemerintah desa yang mendukung Program Pemerintah (%) | 40.00 | 50.00% | **429.871.000** | | 55.00% | | **435.755.934** | | | 60.00% | **446.662.905** | | 65.00% | | **457.378.348** | 70.00% | | | **468.291.396** | 70.00% | | | **468.291.396** | **Kecamatan** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **24.831.000** | |  | | **25.170.936** | | |  | **25.800.965** | |  | | **26.419.930** |  | | | **27.050.310** |  | | | **27.050.310** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **303.600.000** | |  | | **307.756.284** | | |  | **315.459.424** | |  | | **323.027.295** |  | | | **330.734.727** |  | | | **330.734.727** | **Batangmata** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **101.440.000** | |  | | **102.828.714** | | |  | **105.402.516** | |  | | **107.931.123** |  | | | **110.506.359** |  | | | **110.506.359** | **Batangmata Sapo** | | |  | |
|  |  | **7.01.06.2.01** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | 100% | **24.831.000** | | 100% | | **25.170.936** | | | 100% | **25.800.965** | | 100% | | **26.419.930** | 100% | | | **27.050.310** | 100% | | | **27.050.310** | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **303.600.000** | |  | | **307.756.284** | | |  | **315.459.424** | |  | | **323.027.295** |  | | | **330.734.727** |  | | | **330.734.727** |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **101.440.000** | |  | | **102.828.714** | | |  | **105.402.516** | |  | | **107.931.123** |  | | | **110.506.359** |  | | | **110.506.359** | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang di Faslitasi | 10 Desa | 10 Desa | 2.500.000 | | 10 Desa | | 2.839.936 | | | 10 Desa | 3.469.965 | | 10 Desa | | 3.788.930 | 10 Desa | | | 3.919.310 | 10 Desa | | | 3.919.310 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.10 | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Porsentase Kasus yang tertangani | 100% | 100% | 3.700.000 | | 100% | | 3.700.000 | | | 100% | 3.700.000 | | 100% | | 4.000.000 | 100% | | | 4.500.000 | 100% | | | 4.500.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  | Porsentase Jumlah Perangkat Kelurahan yang di beri tunjangan | | | | 303.600.000 |  | | 307.756.284 | | |  | 315.459.424 | |  | | 323.027.295 |  | | | 330.734.727 |  | | | 330.734.727 | Batangmata | |  |  | |
|  |  |  |  | Persentase Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 101.440.000 |  | | 102.828.714 | | |  | 105.402.516 | |  | | 107.931.123 |  | | | 110.506.359 |  | | | 110.506.359 | Batangmata Sapo | | |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Berita acara Musrenbang Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.631.000 | | 1 Laporan | | 12.631.000 | | | 1 Laporan | 12.631.000 | | 1 Laporan | | 12.631.000 | 1 Laporan | | | 12.631.000 | 1 Laporan | | | 12.631.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.14 | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | 7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diikuti | 12 Desa/kel | 12 Desa/Kel. | 6.000.000 | | 12 Desa/Kel. | | 6.000.000 | | | 12 Desa/Kel. | 6.000.000 | | 12 Desa/Kel. | | 6.000.000 | 12 Desa/Kel. | | | 6.000.000 | 12 Desa/Kel. | | | 6.000.000 | **Bontomatene** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABEL 6.2 TABEL PERUBAHAN SESUAI KEPMEN DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BONTOMATENE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN SELAYAR PERIODE 2021-2026 (TABEL. T-C.27)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah** | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** |
| **Tahun-1 (2022)** | | **Tahun-2 (2023)** | | **Tahun-3 (2024)** | | **Tahun-4 (2025)** | | **Tahun-5 (2026)** | |
| **(6)** | **(7)** | | **(8)** | | **(9)** | | **(10)** | | **(11)** | | **(12)** | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **K** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp** | **(13)** |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontomatene |  |  |  | Indeks Refomasi Birokrasi Kecamatan Bontomatene | 33 | 55 |  | 64 |  | 68 |  | 73 |  | 76 |  | 76 |  |  |
|  | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan bontomatene |  |  | Nilai SAKIP Kecamatan | 58 | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  |  |
|  |  | Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | 0 | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  |  |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bontomatene | 66,68 | 70 |  | 72,5 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 85 |  |  |
|  |  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja | 50,91 | 63,03 | 4,584,020,430 | 70,28 | 4,646,775,670 | 70,53 | 4,763,084,465 | 71,51 | 4,877,350,861 | 72,31 | 4,993,724,452 | 72,31 | 23,864,955,878 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 79,35 | 83 |  | 85 |  | 88 |  | 91 |  | 95 |  | 95 |  |
|  |  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Porsentase Capaian Kinerja Penganggrana dan Evaluasi Kinerja Perangkata Daerah | 50,91 | 63,03 | 26,750,000 | 70,25 | 27,150,000 | 70,53 | 28,150,000 | 71,51 | 31,250,000 | 72,31 | 28,250,000 | 72,31 | 141,550,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | 2 | 4,250,000 | 2 | 4,250,000 | 2 | 4,250,000 | 2 | 4,250,000 | 2 | 4,250,000 | 10 | 21,250,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 4,250,000 | 3 | 4,500,000 | 3 | 5,500,000 | 3 | 6,500,000 | 3 | 5,000,000 | 15 | 25,750,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | 3 | 4,250,000 | 4 | 4,400,000 | 3 | 4,400,000 | 3 | 6,500,000 | 3 | 5,000,000 | 16 | 24,550,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 10 | 20,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 10 | 20,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan) | 1 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Porsentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 79,35 | 83 | 3,704,635,309 | 85 | 3,705,035,309 | 88 | 3,710,735,309 | 91 | 3,712,635,309 | 95 | 3,711,135,309 | 95 | 18,544,176,545 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 48 | 50 | 3,428,015,309 | 50 | 3,428,015,309 | 50 | 3,428,015,309 | 50 | 3,428,015,309 | 50 | 3,428,015,309 | 250 | 17,140,076,545 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 2 | 2 | 217,500,000 | 2 | 218,000,000 | 2 | 219,200,000 | 2 | 220,500,000 | 2 | 221,000,000 | 10 | 1,096,200,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 48,120,000 | 1 | 48,120,000 | 1 | 48,120,000 | 1 | 48,120,000 | 1 | 48,120,000 | 5 | 240,600,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD (Dokumen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 2 | 3,500,000 | 2 | 3,400,000 | 2 | 3,400,000 | 2 | 5,500,000 | 2 | 4,000,000 | 10 | 19,800,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 8 | 18 | 7,500,000 | 18 | 7,500,000 | 18 | 12,000,000 | 18 | 10,500,000 | 18 | 10,000,000 | 90 | 47,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Porsentase Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah | 100 | 100 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 100 | 14,000,000 | 100 | 18,000,000 | 100 | 41,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 | 1 | 11,000,000 | 1 | 15,000,000 | 5 | 27,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | 4 | 2,500,000 | 4 | 2,500,000 | 4 | 2,500,000 | 4 | 3,000,000 | 4 | 3,000,000 | 20 | 13,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan BarangMilik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Porsentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 75 | 80 | 32,000,000 | 82 | 58,950,000 | 85 | 37,000,000 | 90 | 37,000,000 | 95 | 78,750,000 | 95 | 243,700,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket) | 0 | 24 | 15,000,000 | 28 | 36,950,000 | 28 | 15,000,000 | 28 | 15,000,000 | 28 | 36,750,000 | 136 | 118,700,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 60 | 10,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yangMeninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 2 | 20,000,000 | 6 | 60,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 | 1 | 5,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 20,000,000 | 5 | 55,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Porsentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 75 | 77 | 153,955,711 | 80 | 156,677,690 | 85 | 175,434,637 | 90 | 195,631,131 | 95 | 183,707,419 | 95 | 865,406,588 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 5 | 3,300,000 | 5 | 3,500,000 | 5 | 4,000,000 | 5 | 4,000,000 | 5 | 3,500,000 | 25 | 18,300,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket) | 0 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 10 | 75,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan (Paket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket) | 0 | 8 | 25,283,711 | 8 | 25,605,690 | 8 | 27,690,637 | 8 | 30,175,652 | 8 | 30,454,834 | 40 | 139,210,524 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan  yang Disediakan (Paket) | 0 | 4 | 7,500,000 | 4 | 7,500,000 | 4 | 9,000,000 | 4 | 9,000,000 | 4 | 9,000,000 | 20 | 42,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 0 | 10 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 50 | 10,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 0 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,583,479 | 1 | 1,880,585 | 5 | 8,464,064 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 | 24 | 5,500,000 | 24 | 6,000,000 | 24 | 6,622,000 | 24 | 4,000,000 | 24 | 4,000,000 | 120 | 26,122,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 0 | 36 | 93,372,000 | 36 | 95,072,000 | 36 | 108,122,000 | 36 | 127,872,000 | 36 | 116,872,000 | 180 | 541,310,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 5 | 5,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Porsentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang diadakan | 75 | 78 | 24,250,000 | 80 | 26,500,000 | 85 | 93,500,000 | 90 | 188,250,000 | 95 | 244,500,000 | 95 | 577,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53,000,000 | 0 | 0 | 2 | 55,000,000 | 4 | 108,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 6,000,000 | 15 | 26,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 7 | 35,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | 2 | 6,000,000 | 2 | 6,500,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 22,500,000 | 0 | 0 | 8 | 50,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 | 2 | 8,250,000 | 2 | 10,000,000 | 3 | 15,500,000 | 5 | 150,750,000 | 5 | 173,500,000 | 17 | 358,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Porsentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75 | 77 | 516,545,410 | 80 | 521,582,671 | 85 | 525,884,519 | 90 | 520,504,421 | 95 | 528,551,724 | 95 | 2,613,068,745 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 | 36 | 28,696,210 | 36 | 33,733,471 | 36 | 38,035,319 | 36 | 32,655,221 | 36 | 40,702,524 | 180 | 173,822,745 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 | 12 | 487,849,200 | 12 | 487,849,200 | 12 | 487,849,200 | 12 | 487,849,200 | 12 | 487,849,200 | 60 | 2,439,246,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Porsentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah | 65 | 70 | 122,884,000 | 75 | 147,880,000 | 80 | 189,380,000 | 85 | 178,080,000 | 90 | 200,830,000 | 90 | 839,054,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | 1 | 34,630,000 | 1 | 34,630,000 | 1 | 34,630,000 | 1 | 34,630,000 | 1 | 34,630,000 | 5 | 173,150,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 11 | 11 | 35,294,000 | 11 | 35,494,000 | 11 | 35,594,000 | 11 | 37,794,000 | 11 | 36,044,000 | 55 | 180,220,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit) | 0 | 1 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | 5 | 17,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | 3 | 44,460,000 | 4 | 69,256,000 | 4 | 100,656,000 | 4 | 87,156,000 | 4 | 111,656,000 | 19 | 413,184,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 8 | 55,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang DilakukanPemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 | 25 | 12,000,000 | 20 | 72,164,280 | 15 | 73,970,552 | 10 | 75,745,105 | 8 | 77,552,384 | 8 | 311,432,321 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Porsentase Koordinasi Yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan | 65 | 70 | 3,000,000 | 75 | 3,164,280 | 80 | 3,470,552 | 85 | 3,767,877 | 90 | 4,072,519 | 90 | 17,475,228 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0 | 12 | 3,000,000 | 12 | 3,164,280 | 12 | 3,470,552 | 12 | 3,767,877 | 12 | 4,072,519 | 60 | 17,475,228 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 80 | 82 | 9,000,000 | 85 | 39,000,000 | 90 | 39,750,000 | 95 | 40,488,614 | 95 | 41,239,932 | 95 | 169,478,546 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 1 | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 | 5 | 22,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Laporan) | 1 | 12 | 4,500,000 | 13 | 34,500,000 | 13 | 35,250,000 | 13 | 35,988,614 | 13 | 36,739,932 | 64 | 146,978,546 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dipelihara | 65 | 70 | 0 | 75 | 30,000,000 | 80 | 30,750,000 | 85 | 31,488,614 | 90 | 32,239,933 | 90 | 124,478,547 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.03.01 | Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.03.02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang MelibatkanPihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan PihakSwasta (Unit) | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,000,000 | 2 | 30,750,000 | 2 | 31,488,614 | 2 | 32,239,933 | 8 | 124,478,547 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 60 | 65 | 0 | 70 | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan |  |  |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontomatene | 0,6456 | 0,7730 |  | 0,7800 |  | 0,7950 |  | 0,8145 |  | 0,8225 |  | 0,8225 |  |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa |  |  | Persentase urusan pemerintahan desa yang difasilitasi | 0 | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 98 |  | 98 |  |  |
|  |  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | 40 | 50 | 429,871,000 | 55 | 435,755,934 | 60 | 446,662,905 | 65 | 457,378,348 | 70 | 468,291,395 | 70 | 2,237,959,582 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 65 | 70 | 429,871,000 | 75 | 435,755,934 | 80 | 446,662,905 | 85 | 457,378,348 | 90 | 468,291,395 | 90 | 2,237,959,582 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa (Dokumen) | 10 | 10 | 2,500,000 | 10 | 2,839,936 | 10 | 3,469,965 | 10 | 3,788,930 | 10 | 3,919,310 | 50 | 16,518,141 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangkaPenerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.10 | Fasilitasi Penetapan Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum (Dokumen) | 0 | 36 | 408,740,000 | 36 | 414,284,998 | 36 | 424,561,940 | 36 | 434,958,418 | 36 | 445,741,085 | 180 | 2,128,286,441 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 | 1 | 12,631,000 | 1 | 12,631,000 | 1 | 12,631,000 | 1 | 12,631,000 | 1 | 12,631,000 | 5 | 63,155,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.14 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa denganPihak Ketiga (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan PenegasanBatas Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan (Laporan) | 12 | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 60 | 30,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontomatene |  |  |  | Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Bontomatene | - | 0,6900 |  | 0,7000 |  | 0,7001 |  | 0,7150 |  | 0,7150 |  | 0,7150 |  |  |
|  | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat |  |  | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan | 0 | 67,44 |  | 71,23 |  | 75,35 |  | 77,14 |  | 80,25 |  | 80,25 |  |  |
|  |  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan | 0 | 0 | 121,900,500 | 0 | 138,569,318 | 0 | 142,037,708 | 0 | 145,445,192 | 0 | 148,915,515 | 0 | 696,868,233 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan | 70 | 75 | 121,900,500 | 80 | 138,569,318 | 85 | 142,037,708 | 90 | 145,445,192 | 95 | 148,915,515 | 95 | 696,868,233 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 | 150 | 30,000,000 | 175 | 45,543,493 | 200 | 46,626,238 | 250 | 47,984,701 | 275 | 49,368,216 | 1050 | 219,522,648 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPersatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang) | 0 | 25 | 91,900,500 | 30 | 93,025,825 | 35 | 95,411,470 | 40 | 97,460,491 | 45 | 99,547,299 | 175 | 477,345,585 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.06 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | Jumlah Lembaga Masyarakat yangDikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomatene |  |  |  | Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan | - | 78,13 |  | 80,15 |  | 82,30 |  | 85,75 |  | 90,35 |  | 90,35 |  |  |
|  | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontomatene |  |  | Tingkat toleransi di Kecamatan | 0 | 90,09 |  | 91,12 |  | 92,23 |  | 92,75 |  | 93,15 |  | 93,15 |  |  |
|  |  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan | 0 | 1 | 19,600,000 | 1 | 49,868,324 | 1 | 51,116,528 | 1 | 52,342,814 | 1 | 53,591,713 | 1 | 226,519,379 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | 70 | 75 | 14,600,000 | 80 | 44,731,424 | 85 | 45,725,901 | 90 | 46,702,916 | 95 | 47,697,947 | 95 | 199,458,188 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | 12 | 14,600,000 | 12 | 44,731,424 | 12 | 45,725,901 | 12 | 46,702,916 | 12 | 47,697,947 | 60 | 199,458,188 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | 70 | 75 | 5,000,000 | 80 | 5,136,900 | 85 | 5,390,627 | 90 | 5,639,898 | 95 | 5,893,766 | 95 | 27,061,191 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Laporan) | 12 | 12 | 5,000,000 | 12 | 5,136,900 | 12 | 5,390,627 | 12 | 5,639,898 | 0 | 5,893,766 | 48 | 27,061,191 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan |  |  |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontomatene | 0,6456 | 0,7730 | 7,606,816,405 | 0,7800 | 7,710,953,722 | 0,7950 | 7,903,958,894 | 0,8145 | 8,093,574,866 | 0,8225 | 8,286,687,563 | 0,8225 | 39,601,991,450 |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  | Persentase peningkatan fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan | 0 | 33,33 | 7,606,816,405 | 33,33 | 7,710,953,722 | 33,33 | 7,903,958,894 | 33,33 | 8,093,574,866 | 33,33 | 8,286,687,563 | 33,33 | 39,601,991,450 |  |
|  |  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan | 100 | 100 | 2,439,424,475 | 100 | 2,367,820,196 | 100 | 2,427,086,736 | 100 | 2,485,312,546 | 100 | 2,544,612,104 | 100 | 12,264,256,057 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan | 60 | 65 | 20,000,000 | 70 | 20,000,000 | 75 | 20,000,000 | 80 | 20,000,000 | 85 | 20,000,000 | 85 | 100,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 60 | 100,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 75 | 80 | 2,330,305,505 | 82 | 2,258,085,177 | 85 | 2,316,288,916 | 90 | 2,335,314,037 | 95 | 2,393,471,188 | 95 | 11,633,464,823 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | 2 | 47,120,000 | 2 | 47,120,000 | 2 | 47,120,000 | 2 | 49,620,000 | 2 | 50,120,000 | 10 | 241,100,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit) | 4 | 5 | 1,344,235,055 | 10 | 1,303,473,458 | 10 | 1,318,049,743 | 12 | 1,344,106,665 | 14 | 1,357,699,427 | 51 | 6,667,564,348 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | 7 | 938,950,450 | 5 | 907,491,719 | 5 | 951,119,173 | 5 | 941,587,372 | 5 | 985,651,761 | 27 | 4,724,800,475 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan | 60 | 65 | 89,118,970 | 65 | 89,735,019 | 70 | 90,797,820 | 75 | 129,998,509 | 85 | 131,140,916 | 85 | 530,791,234 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | 3 | 79,118,970 | 3 | 79,735,019 | 3 | 80,797,820 | 3 | 119,998,509 | 3 | 120,140,916 | 15 | 479,791,234 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas LembagaKemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana LembagaKemasyarakatan yang Disediakan (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat (Laporan) | 1 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 11,000,000 | 5 | 51,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.05 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna (Laporan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.02 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.03 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.04 | Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| **Total** | | | | | | | **7,606,816,405** |  | **7,710,953,722** |  | **7,903,958,894** |  | **8,093,574,866** |  | **8,286,687,563** |  | **39,601,991,450** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABEL 6.3 PERUBAHAN SESUAI PERMEN DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BONTOMATENE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN SELAYAR PERIODE 2021-2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Kode** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah** | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab** |
| **Tahun-1 (2022)** | | **Tahun-2 (2023)** | | **Tahun-3 (2024)** | | **Tahun-4 (2025)** | | **Tahun-5 (2026)** | |
| **(6)** | **(7)** | | **(8)** | | **(9)** | | **(10)** | | **(11)** | | **(12)** | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **K** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp** | **(13)** |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontomatene |  |  |  | Indeks Refomasi Birokrasi Kecamatan Bontomatene | 33 |  |  |  |  | 68 |  | 73 |  | 76 |  | 76 |  |  |
|  | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan bontomatene |  |  | Nilai SAKIP Kecamatan | 58 |  |  |  |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  |  |
|  |  | Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan | 0 |  |  |  |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  | sesuai |  |  |
|  |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bontomatene | 66,68 |  |  |  |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 85 |  |  |
|  |  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja | 50,91 |  |  |  |  | 70,53 | 4,763,084,465 | 71,51 | 4,877,350,861 | 72,31 | 4,993,724,452 | 72,31 | 23,864,955,878 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Persentase Capaian Kinerja Keuangan | 79,35 |  |  |  |  | 88 |  | 91 |  | 95 |  | 95 |  |
|  |  | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Porsentase Capaian Kinerja Penganggrana dan Evaluasi Kinerja Perangkata Daerah | 50,91 |  |  |  |  | 70,53 | 28,150,000 | 71,51 | 31,250,000 | 72,31 | 28,250,000 | 72,31 | 141,550,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 2 | 4,250,000 | 2 | 4,250,000 | 2 | 4,250,000 | 10 | 21,250,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 3 |  |  |  |  | 3 | 5,500,000 | 3 | 6,500,000 | 3 | 5,000,000 | 15 | 25,750,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 3 |  |  |  |  | 3 | 4,400,000 | 3 | 6,500,000 | 3 | 5,000,000 | 16 | 24,550,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 2 |  |  |  |  | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 10 | 20,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 |  |  |  |  | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 10 | 20,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Porsentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 79,35 |  |  |  |  | 88 | 3,710,735,309 | 91 | 3,712,635,309 | 95 | 3,711,135,309 | 95 | 18,544,176,545 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 48 |  |  |  |  | 50 | 3,428,015,309 | 50 | 3,428,015,309 | 50 | 3,428,015,309 | 250 | 17,140,076,545 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 2 |  |  |  |  | 2 | 219,200,000 | 2 | 220,500,000 | 2 | 221,000,000 | 10 | 1,096,200,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 48,120,000 | 1 | 48,120,000 | 1 | 48,120,000 | 5 | 240,600,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 2 | 3,400,000 | 2 | 5,500,000 | 2 | 4,000,000 | 10 | 19,800,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 8 |  |  |  |  | 18 | 12,000,000 | 18 | 10,500,000 | 18 | 10,000,000 | 90 | 47,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Porsenatse Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah | 100 |  |  |  |  | 100 | 3,000,000 | 100 | 14,000,000 | 100 | 18,000,000 | 100 | 41,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 500,000 | 1 | 11,000,000 | 1 | 15,000,000 | 5 | 27,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 |  |  |  |  | 4 | 2,500,000 | 4 | 3,000,000 | 4 | 3,000,000 | 20 | 13,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan BarangMilik Daerah SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Porsentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 75 |  |  |  |  | 85 | 37,000,000 | 90 | 37,000,000 | 95 | 78,750,000 | 95 | 243,700,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 28 | 15,000,000 | 28 | 15,000,000 | 28 | 36,750,000 | 136 | 118,700,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 60 | 10,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yangMeninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 1 |  |  |  |  | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 2 | 20,000,000 | 6 | 60,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 0 |  |  |  |  | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 20,000,000 | 5 | 55,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Porsentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 75 |  |  |  |  | 85 | 175,434,637 | 90 | 195,631,131 | 95 | 183,707,419 | 95 | 865,406,588 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 5 | 4,000,000 | 5 | 4,000,000 | 5 | 3,500,000 | 25 | 18,300,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 10 | 75,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 8 | 27,690,637 | 8 | 30,175,652 | 8 | 30,454,834 | 40 | 139,210,524 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 4 | 9,000,000 | 4 | 9,000,000 | 4 | 9,000,000 | 20 | 42,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 10 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 50 | 10,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 0 |  |  |  |  | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,583,479 | 1 | 1,880,585 | 5 | 8,464,064 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 24 | 6,622,000 | 24 | 4,000,000 | 24 | 4,000,000 | 120 | 26,122,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 36 | 108,122,000 | 36 | 127,872,000 | 36 | 116,872,000 | 180 | 541,310,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 5 | 5,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Porsentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang diadakan | 75 |  |  |  |  | 85 | 93,500,000 | 90 | 188,250,000 | 95 | 244,500,000 | 95 | 577,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 2 | 53,000,000 | 0 | 0 | 2 | 55,000,000 | 4 | 108,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 6,000,000 | 15 | 26,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 1 | 5,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 7 | 35,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 2 | 15,000,000 | 2 | 22,500,000 | 0 | 0 | 8 | 50,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 3 | 15,500,000 | 5 | 150,750,000 | 5 | 173,500,000 | 17 | 358,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Porsentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75 |  |  |  |  | 85 | 525,884,519 | 90 | 520,504,421 | 95 | 528,551,724 | 95 | 2,613,068,745 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 36 | 38,035,319 | 36 | 32,655,221 | 36 | 40,702,524 | 180 | 173,822,745 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 12 | 487,849,200 | 12 | 487,849,200 | 12 | 487,849,200 | 60 | 2,439,246,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Porsentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah | 65 |  |  |  |  | 80 | 189,380,000 | 85 | 178,080,000 | 90 | 200,830,000 | 90 | 839,054,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 |  |  |  |  | 1 | 34,630,000 | 1 | 34,630,000 | 1 | 34,630,000 | 5 | 173,150,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 11 |  |  |  |  | 11 | 35,594,000 | 11 | 37,794,000 | 11 | 36,044,000 | 55 | 180,220,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit) | 0 |  |  |  |  | 1 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 | 5 | 17,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 |  |  |  |  | 4 | 100,656,000 | 4 | 87,156,000 | 4 | 111,656,000 | 19 | 413,184,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 |  |  |  |  | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 8 | 55,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 0.00.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang DilakukanPemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 30 |  |  |  |  | 15 | 73,970,552 | 10 | 75,745,105 | 8 | 77,552,384 | 8 | 311,432,321 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Porsentase Koordinasi Yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan | 65 |  |  |  |  | 80 | 3,470,552 | 85 | 3,767,877 | 90 | 4,072,519 | 90 | 17,475,228 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 12 | 3,470,552 | 12 | 3,767,877 | 12 | 4,072,519 | 60 | 17,475,228 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 80 |  |  |  |  | 90 | 39,750,000 | 95 | 40,488,614 | 95 | 41,239,932 | 95 | 169,478,546 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 | 1 | 4,500,000 | 5 | 22,500,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 13 | 35,250,000 | 13 | 35,988,614 | 13 | 36,739,932 | 64 | 146,978,546 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dipelihara | 65 |  |  |  |  | 80 | 30,750,000 | 85 | 31,488,614 | 90 | 32,239,933 | 90 | 124,478,547 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.03.0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang MelibatkanPihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan PihakSwasta (Unit) | 0 |  |  |  |  | 2 | 30,750,000 | 2 | 31,488,614 | 2 | 32,239,933 | 8 | 124,478,547 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 60 |  |  |  |  | 75 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan |  |  |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontomatene | 0,6456 |  |  |  |  | 0,7950 |  | 0,8145 |  | 0,8225 |  | 0,8225 |  |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa |  |  | Persentase urusan pemerintahan desa yang difasilitasi | 0 |  |  |  |  | 90 |  | 95 |  | 98 |  | 98 |  |  |
|  |  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | 40 |  |  |  |  | 60 | 446,662,905 | 65 | 457,378,348 | 70 | 468,291,395 | 70 | 2,237,959,582 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 65 |  |  |  |  | 80 | 446,662,905 | 85 | 457,378,348 | 90 | 468,291,395 | 90 | 2,237,959,582 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa (Dokumen) | 10 |  |  |  |  | 10 | 3,469,965 | 10 | 3,788,930 | 10 | 3,919,310 | 50 | 16,518,141 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangkaPenerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0010 | Fasilitasi Penetapan Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 36 | 424,561,940 | 36 | 434,958,418 | 36 | 445,741,085 | 180 | 2,128,286,441 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLembaga Kemasyarakatan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen) | 1 |  |  |  |  | 1 | 12,631,000 | 1 | 12,631,000 | 1 | 12,631,000 | 5 | 63,155,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0014 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa denganPihak Ketiga (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan PenegasanBatas Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan (Laporan) | 12 |  |  |  |  | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 60 | 30,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontomatene |  |  |  | Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Bontomatene | - |  |  |  |  | 0,7001 |  | 0,7150 |  | 0,7150 |  | 0,7150 |  |  |
|  | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat |  |  | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan | 0 |  |  |  |  | 75,35 |  | 77,14 |  | 80,25 |  | 80,25 |  |  |
|  |  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan | 0 |  |  |  |  | 0 | 142,037,708 | 0 | 145,445,192 | 0 | 148,915,515 | 0 | 696,868,233 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan | 70 |  |  |  |  | 85 | 142,037,708 | 90 | 145,445,192 | 95 | 148,915,515 | 95 | 696,868,233 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 100 |  |  |  |  | 200 | 46,626,238 | 250 | 47,984,701 | 275 | 49,368,216 | 1050 | 219,522,648 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPersatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang) | 0 |  |  |  |  | 35 | 95,411,470 | 40 | 97,460,491 | 45 | 99,547,299 | 175 | 477,345,585 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | Jumlah Lembaga Masyarakat yangDikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomatene |  |  |  | Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan | - |  |  |  |  | 82,30 |  | 85,75 |  | 90,35 |  | 90,35 |  |  |
|  | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontomatene |  |  | Tingkat toleransi di Kecamatan | 0 |  |  |  |  | 92,23 |  | 92,75 |  | 93,15 |  | 93,15 |  |  |
|  |  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan | 0 |  |  |  |  | 1 | 51,116,528 | 1 | 52,342,814 | 1 | 53,591,713 | 1 | 226,519,379 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | 70 |  |  |  |  | 85 | 45,725,901 | 90 | 46,702,916 | 95 | 47,697,947 | 95 | 199,458,188 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan (Laporan) | 12 |  |  |  |  | 12 | 45,725,901 | 12 | 46,702,916 | 12 | 47,697,947 | 60 | 199,458,188 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | 70 |  |  |  |  | 85 | 5,390,627 | 90 | 5,639,898 | 95 | 5,893,766 | 95 | 27,061,191 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Laporan) | 12 |  |  |  |  | 12 | 5,390,627 | 12 | 5,639,898 | 0 | 5,893,766 | 48 | 27,061,191 | KECAMATAN BONTOMATENE |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan |  |  |  | Indeks Desa Membangun Kecamatan Bontomatene | 0,6456 |  |  |  |  | 0,7950 | 7,903,958,894 | 0,8145 | 8,093,574,866 | 0,8225 | 8,286,687,563 | 0,8225 | 39,601,991,450 |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  | Persentase peningkatan fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan | 0 |  |  |  |  | 33,33 | 7,903,958,894 | 33,33 | 8,093,574,866 | 33,33 | 8,286,687,563 | 33,33 | 39,601,991,450 |  |
|  |  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan | 100 |  |  |  |  | 100 | 2,427,086,736 | 100 | 2,485,312,546 | 100 | 2,544,612,104 | 100 | 12,264,256,057 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan | 60 |  |  |  |  | 75 | 20,000,000 | 80 | 20,000,000 | 85 | 20,000,000 | 85 | 100,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 60 | 100,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 75 |  |  |  |  | 85 | 2,316,288,916 | 90 | 2,335,314,037 | 95 | 2,393,471,188 | 95 | 11,633,464,823 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 |  |  |  |  | 2 | 47,120,000 | 2 | 49,620,000 | 2 | 50,120,000 | 10 | 241,100,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun (Unit) | 4 |  |  |  |  | 10 | 1,318,049,743 | 12 | 1,344,106,665 | 14 | 1,357,699,427 | 51 | 6,667,564,348 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 |  |  |  |  | 5 | 951,119,173 | 5 | 941,587,372 | 5 | 985,651,761 | 27 | 4,724,800,475 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan | 60 |  |  |  |  | 70 | 90,797,820 | 75 | 129,998,509 | 85 | 131,140,916 | 85 | 530,791,234 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDiselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 |  |  |  |  | 3 | 80,797,820 | 3 | 119,998,509 | 3 | 120,140,916 | 15 | 479,791,234 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas LembagaKemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangDitingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana LembagaKemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana LembagaKemasyarakatan yang Disediakan (Unit) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat (Laporan) | 1 |  |  |  |  | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 11,000,000 | 5 | 51,000,000 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna (Laporan) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.0001 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.0002 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.0003 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.05.0004 | Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN BONTOMATENE |
|  |  | 7.01.03.2.06.0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegar | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.03.2.06.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | | | | | | |  |  |  |  | **7,903,958,894** |  | **8,093,574,866** |  | **8,286,687,563** |  | **39,601,991,450** |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, Kecamatan Bontomatene menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontomatene dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontomatene dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

**Tabel. 7.1. T-C.28**

### Indikator Kinerja Kecamatan Bontomatene yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

**RPJMD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Kondisi  Kinerja pada awal periode  RPJMD |  | Target capaian Setiap Tahun | | |  | Kondisi  Kinerja pada akhir periode  RPJMD |
| Tahun 2020 | Tahun  1 | Tahun  2 | Tahun  3 | Tahun  4 | Tahun  5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 66,60 % | 69,50 % | 72,00 % | 74,50 % | 79,30 % | 85,00 % | 85,00 % |
| 2. | Nilai SAKIP Kecamatan | 58,85 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3. | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4. | Persentase Meningkatnya  Fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang dikoordinasikan |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5. | Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang  difasilitasi |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6. | Indeks Ketahanan Sosial | 0,6817 | 0,6890 | 0,6915 | 0,7080 | 0,7120 | 0,715 | 0,7150 |
| 7. | Angka Kriminalitas | 10,56 | 9,50 | 8,80 | 8,00 | 7,30 | 6,50 | 6,50 |

**Tabel. 7.1. T-C.28**

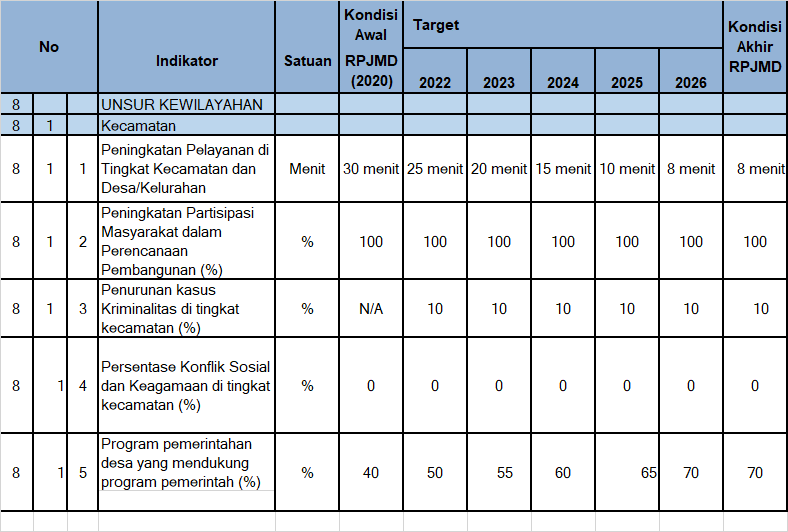
### Perubahan Indikator Kinerja Kecamatan Bontomatene yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

**RPJMD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD |
| Tahun 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 66,68 | 70,00 | 72,50 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
|  | Nilai SAKIP Kecamatan | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80,00 |
|  | Laporan Keuangan sesuai standar Akuntasi Pemerintahan | n/a | 72.015 | 73.943 | 77.642 | 79.325 | 79.424 | 79.424 |
|  | % Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan | n/a | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33% |
|  | % Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi | n/a | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 98% |
|  | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan Bontomatene | n/a | 67.44 | 71.23 | 75.35 | 77.14 | 80.25 | 80.25 |
|  | Tingkat toleransi di Kecamatan Bontomatene | n/a | 90.09 | 91.12 | 92.23 | 92.75 | 93.15 | 93,15 |

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

### (rujukannya bab 8 tabel 8,3 RPJMD)



**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bontomatene Tahun 2021-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Bontomatene ini disusun untuk kurung waktu 2021 - 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, Renstra ini nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontomatene setiap tahunnya.

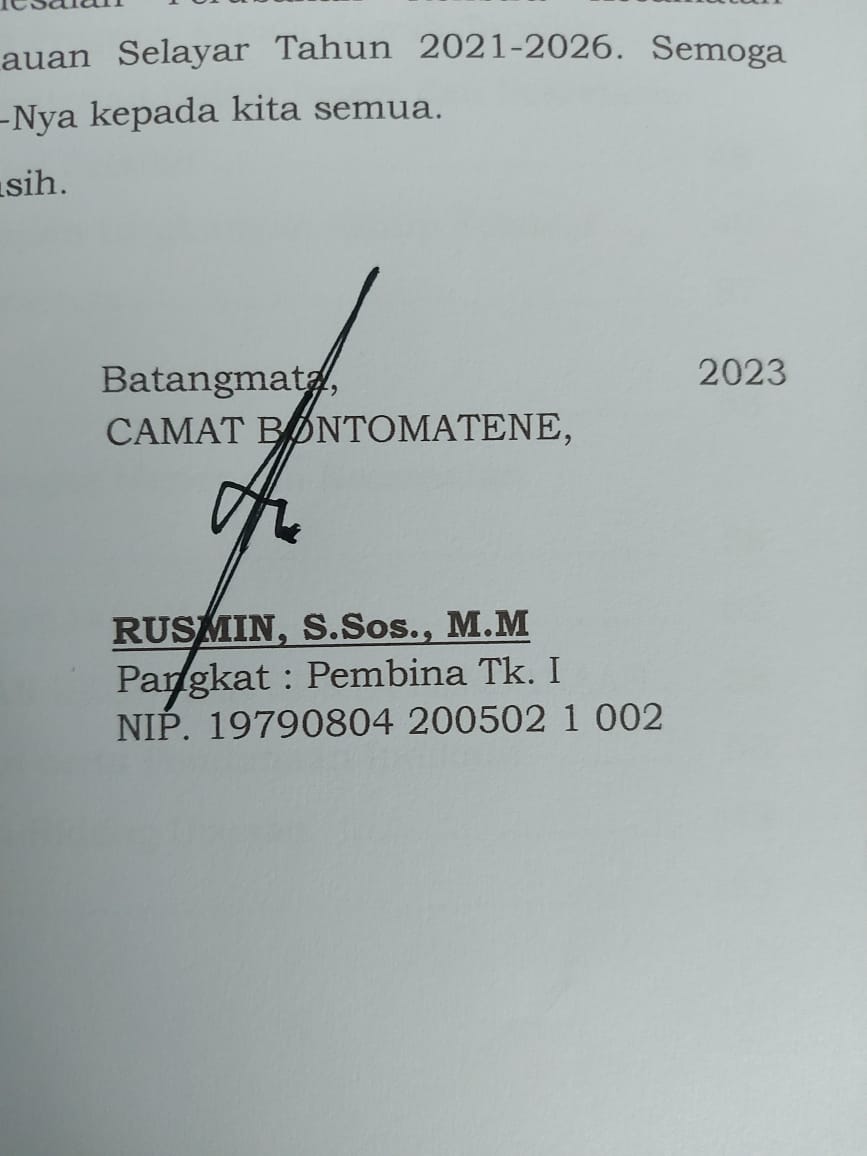
Renstra Perubahan Kecamatan ini dapat di capai jika ada komitmen bersama dari seluruh aparatur dengan masyarakat serta keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Renstra. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Camat Bontomatene sebagai koordinator (fasilitator) wilayah

Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan program-program Kabupaten

Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya. Kecamatan bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kecamatan. Juga berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bontomatene dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Akhir kata dengan selesainya Renstra Perubahan Kecamatan Bontomatene Tahun 2021 – 2026 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bontomatene.



Batangmata, 2023

CAMAT BONTOMATENE,

**RUSMIN, S.Sos., M.M**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19790804 200502 1 002